

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN PEDAGANG  
KAKI LIMA DI KECAMATAN PESISIR TENGAH KABUPATEN  
PESISIR BARAT**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial(S.sos)  
Pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Oleh :

**Okta Candra**

**1441020057**

**Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam**

**PEMBIMBING I : Dr. H. M. Saifuddin M.Pd**

**PEMBIMBING II : Bambang Budiwiranto, S.Ag. MA (AS) P.hD**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1442 H / 2021 M**

**ABSTRAK**  
**UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN**  
**PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN PESISIR TENGAH**  
**KABUPATEN PESISIR BARAT**

Oleh: **Okta candra**

Masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak kunjung selesai di setiap daerah di Indonesia, permasalahan ini muncul tiap tahun dan terus saja berlangsung tanpa ada solusi yang tepat dalam pelaksanaannya. Keberadaan PKL kerap dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapian kota. Dengan begitu banyak kendala yang harus di hadapi diantaranya kurang modal, tempat berjualan yang tidak menentu, berangkat dari fenomena tersebut pemerintah daerah kecamatan Pesisir Tengah melalui Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan melakukan Upaya-upaya dalam Membina Pedagang Kaki Lima berdasarkan UU Perbup No 40 Tahun 2016 yang berlaku di Kecamatan Pesisir tengah Pesisir Barat.

Penulis mengadakan penelitian mengenai Upaya Pemerintah Daerah Dalam Membina Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pesisir Tengah Pesisir Barat dengan Rumusan masalah: Bagaimana Upaya Pemerintah dalam pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pesisir tengah Pesisir Barat ?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Upaya pemerintah dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pesisir Tengah Pesisir Barat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Pengambilan sample dengan menggunakan teknik purposive sampling, sehingga diperoleh 5 Orang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Wawancara, Observasi dan Dokumentasi dan kemudian dianalisis dengan metode induktif.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, didapat temuan sebagai berikut: dalam upaya Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan pelaksanaan Perbup No 40 tahun 2016 di kecamatan Pesisir Tengah pemerintah telah melaksanakan beberapa upaya adalah dibangunnya kios di pasar way batu pemberian bantuan gerobak dan tenda serta di buat lokasi sentra kuliner untuk pedagang kaki lima untuk berjualan pada malam hari.

Dalam proses pembinaan Diskoperindag melakukan komunikasi secara persuasif dan represif kepada para pedagang tidak menaati peraturan, telah dibangun pasar way batu untuk menampung para pedagang kaki lima agar tidak berjualan di ruang publik, bantuan gerobak sebanyak 30 gerobak dan 30 tenda namun tenda yang sebagian besar telah rusak, sentra kuliner juga telah dibuat agar pedagang di beri ruang yang legal untuk berjualan. Belum berjalannya semua program yang di rencanakan pemerintah seperti bina permodalan dan juga bina

organisasi dimana kedua program ini sangat dibutuhkan dalam pengembangan usaha mereka.

**Kata Kunci : Pembinaan, Pedagang Kaki Lima dan Pemerintah**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : OKTA CANDRA

NPM : 1441020057

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat”** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak mengisi materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, apabila ternyata dikemudian hari terdapat plagiarisme, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, November 2020

Yang Membuat Pernyataan

OKTA CANDRA

NPM.1441020057

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM  
PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI  
KECAMATAN PESISIR PESISIR TENGAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**Nama : Okta Candra**

**NPM : 1441020057**

**Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam**

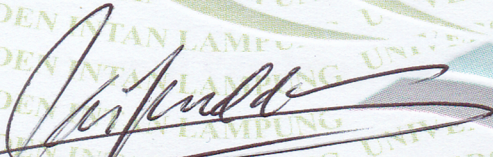
**Fakultas : Dakwah Dan Ilmu Komunikasi**

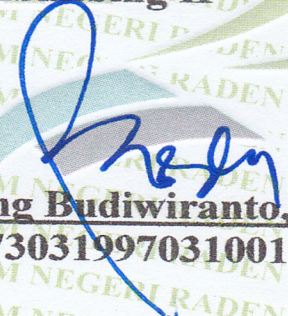
**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqosyah Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi  
UIN Raden Intan Lampung

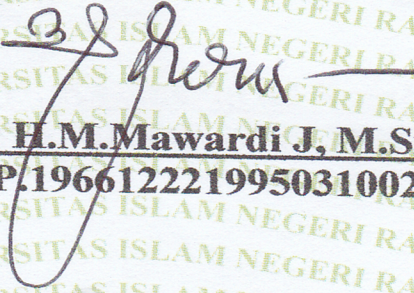
**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. H. M. Saifuddin, M.Pd**  
**NIP.196202251990011002**

  
**Bambang Budiwiranto, S.Ag. MA(AS)P.hd**  
**NIP.1973031997031001**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan PMI**

  
**Dr. H. M. Mawardi J, M.Si**  
**NIP.196612221995031002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN PESISIR TENGAH KABUPATEN PESISIR BARAT.** Disusun oleh **Okta Candra, NPM: 1441020057, Jurusan: Pengembangan Masyarakat Islam.** Telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi. Pada hari/tanggal: **Senin, 6 Januari 2021.**

**TIM MUNAQOSAH**

**Ketua** : **Dr. H.M.Mawardi J, M.Si** (.....)

**Sekretaris** : **Fiqih Satria, M.T.I** (.....)

**Penguji Utama** : **Dr. Faizal, M.Ag** (.....)

**Penguji Pendamping I** : **Dr. H. M. Saifuddin, M.Pd** (.....)

**Penguji Pendamping II** : **Bambang Budiwiranto, P.hD** (.....)

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi**



**Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si.**

**NIP. 196104091990031002**

# MOTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.*

**( QS. Al Insyirah:6-8 )**

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur atas nikmat Allah SWT. Dengan nikmat sehat yang diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan. Dengan terselesaikannya skripsi ini, dengan ini penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua ku tercinta terutama teruntuk Almarhumah Ibundaku, Meli Yunara, yang mana semasa masih hidup beliaulah yang senantiasa mendukung dengan sepenuh jiwa raga dan kasih sayang yang tiada tara, mendo'akan, menyemangati, menasehati dan selalu mengingatkan. Dan untuk ayahanda ku tercinta Zainal Hakim , terimakasih atas segala pengorbanan siang malam mu dalam membiayai ku dan mendoakan ku serta kasih sayang mu. Atas kasih sayang, kerja keras, do'a, semangat dan motivasi-motivasi yang selalu kalian berikan skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Keluarga ku tercinta, untuk Almarhun Kakek Zairi dan juga Nenek Masamah serta kakak ku Desrianto SH dan adek ku Reza Yanuar. Terimakasih untuk dukungan dan doanya, kalian selalu memberikan motivasi dalam diri untuk selalu sabar dalam menghadapi segala ujian. Kalian merupakan pengganti almarhum ibunda dalam mencurahkan keluh kesah. Terimakasih untuk segalanya.
3. Sahabatku, M Indillah S.pd, Muhtadin S.Ag, Takwanuddin M.pd, .Terimakasih untuk motivasi dan dukungan kalian semua dan terimakasih juga telah mau menemaniku dalam menimba ilmu.



4. Teman-teman PMI A, Ahmad Rivai, Ahmad Khotib Saipi dahlan, M Syaidi Fatoni, Nasrudin Ali, Tesi Andika, Ar Ridho Square serta semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan dan semangat yang kalian berikan selama berjuang bersama-sama hingga akhir.
5. Teman-teman seperjuangan terkhusus jurusan Pengembangan Masyarakat Islam angkatan 2014, PMI A, PMI B, dan PMI C.
6. Teman-teman KKN kelompok 131 Desa Kedaung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan
7. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Okta candra dilahirkan di Desa Fajar Bulan tepatnya di Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 15 oktober 1994. Anak ke dua dari 3 bersaudara, lahir dari latar belakang anak seorang petani pasangan Almarhumah Ibu Meli Yunara dan Bapak Zainal Hakim

Riwayat pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Negeri Pahlungan dan lulus pada tahun 2007. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Pesisir Tengah dan selesai pada tahun 2010. Selanjutnya pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kruai Kecamatan Pesisir Tengah dan selesai pada tahun 2013.

Pada tahun 2014 juga penulis langsung melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dan diterima sebagai mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi pada Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah mengajarkan manusia untuk selalu menggali ilmu Agama dan pengetahuan. Dengan rahmat-Nyalah penulis dapat menyelesaikan Skripsi tentang “Upaya Pemerintah Daerah Dalam pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat”. Sholawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat dan umatnya.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang sangat berjasa. Untuk itu terimakasih penulis sampaikan atas bantuan berbagai pihak diantaranya:

1. Bapak Prof. Khomsarial Romli, M.S selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr.M.Mawardi J.M.Si selaku Ketua Jurusan serta Bapak Zamhariri, S.Ag, M.Sos.I selaku Sekretaris Jurusan PMI Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr.M.Saifuddin M.pd selaku pembimbing I, dan Bapak Bambang Budiwiranto, S.Ag. MA(AS)P.hD selaku pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
5. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah memberikan ilmu dan arahan pada penulis.
6. Pihak perpustakaan Pusat dan juga Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah menyediakan buku-buku referensi pada penulis.

7. Kepala Dinas Koperasi, UKM Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pesisir Barat Bapak Ambar Setiawan ST, telah Mengizinkan Penulis meneliti di Instansi Bapak, serta Bapak Burhanuddin selaku seksi Perdagangan Dalam Negeri telah membantu penulis memberikan informasi demi terselsainya skripsi ini.

Akhirnya ungkapan Do'a terucap dengan ikhlas, mudah-mudahan seluruh jasa baik moril maupun materil berbagai pihak, dinilai baik dan membuahkan pahala disisi Allah SWT.

Bandar Lampung, Februari 2020

Penulis

**Okta Candra**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	4
C. Latar Belakang Masalah .....	6
D. Rumusan Masalah .....	11
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Metode Penelitian .....	12
<b>BAB II PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA</b>	
A. Kebijakan Publik .....	21
B. Implementasi Kebijakan .....	23
1. faktor yang mempengaruhi kebijakan.....	23
C. Pembinaan Pedagang Kaki Lima.....	27
1. Pengertian Pembinaan .....	27
2. Pembinaan sebagai program dan Proses .....	31
3. Strategi Pembinaan Pedagang Kaki Lima.....	33
D. Pedagang Kaki Lima .....	37
1. Pengertian Pedagang Kaki Lima .....	37
2. Sejarah Pedagang Kaki Lima .....	37
3. Kegiatan Pedagang Kaki Lima.....	40
4. Letak Lokasi Pedagang Kaki Lima .....	42
5. Karakteristik Pedagang Kaki Lima .....	43
<b>BAB III PEMERINTAH KECAMATAN PESISIR TENGAH DALAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA</b>	
A. Pemerintahan Kecamatan Pesisir Tengah .....	47
1. Monografi Kecamatan Pesisir Tengah .....	47
2. Kondisi wilayah .....	46
3. Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pesisir Tengah .....	51
B. Gambaran Umum DISKOPERINDAG Kab Pesisir Barat.....	55
1. Tugas Pokok dan Fungsi .....	55
2. Fungsi Diskoperindag .....	56
3. Visi dan Misi Diskoperindag .....	56

4. Struktur Organisasi Diskoperindag.....	58
5. Tugas Pokok dan Fungsi Kepegawaian Diskoperindag .....	58
C.Upaya Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat .....	66

**BAB IV ANALISIS UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM  
PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN PESISIR  
TENGAH**

A. Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pesisir Tengah dan Permasalahannya .....	94
B. Analisa Upaya Pemerintah dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima Pedagang Kaki Lima .....	96

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	102
B. Saran .....	103
C. Penutup .....	103

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Judul Skripsi ini berjudul “ **UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN PESISIR TENGAH KABUPATEN PESISIR BARAT**”, untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul ini terlebih dahulu penulis jelaskan kalimat-kalimat yang dianggap perlu .

Upaya adalah suatu usaha untuk meningkatkan kualitas , kemampuan dan taraf hidup<sup>1</sup> Atau suatu kegiatan yang mengerahkan tenaga, pikiran untuk mencapai sesuatu<sup>2</sup> sedangkan menurut Poerwadarmita dalam jurnal Muhammad Fitrah, upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal, dan ikhtiar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan<sup>3</sup>

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Teori dan praktik ekonomi Islam* (Jakarta : Rineka Cipta. 1995) h 67

<sup>2</sup> Peter Salim Dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Pers,1991), h. 61

<sup>3</sup> Muhammad Fitarah, *Study Tentang Upaya Upt. Dinas Kelautan Dan Perikanan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*, Jurnal. h. 80

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah<sup>4</sup>

Salah satu fungsi Pemerintahan Daerah adalah Menjalankan otonomi seluas-luasnya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah<sup>5</sup>

Dari definisi diatas pemerintah daerah yang penulis maksud adalah pemerintahan daerah Kabupaten Pesisir Barat. Berdasarkan fungsinya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentu mengeluarkan suatu kebijakan kaitannya dengan penelitian penulis yaitu Perbup No 40 Tahun 2016<sup>6</sup> tentang pembinaan pedagang kaki lima dalam peraturan tersebut pelaksana pembinaan Pedagang kaki lima tersebut adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pesisir Barat.

Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan dan pelaksanaan suatu pekerjaan secara efektif untuk mencapai tujuan yang lebih baik.<sup>7</sup> Secara konseptual, pembinaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pembinaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>5</sup> Inu Kencana Syafii, Sistem Administrasi Negera Republik Indonesia, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003), h. 129

<sup>6</sup> Lampiran Perbup No 40 taun 2016

<sup>7</sup> Ensiklopedia Indonesia vol ichtiar baru van Hoeve, Jakarta , h 89



membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pembinaan menunjuk pada kemampuan orang atau kelompok masyarakat, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam : Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kesakitan. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.<sup>8</sup>

Pedagang adalah orang yang mencari nafkah dengan berdagang

Pedagang yang penulis maksud adalah pedagang yang berjualan di seputaran pasar<sup>9</sup> di sekitaran kecamatan Pesisir tengah Krui Pesisir barat.

Pedagang Kaki Lima adalah orang-orang yang berdagang yang menggelar barang dagangannya dengan cukup menyediakan tempat darurat, seperti bangku yang biasa berkaki empat, di tambah dengan sepasang kaki pedagangnyanya sehingga berjumlah lima yang kemudian memunculkan istilah Pedagang Kaki Lima..

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disebut PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Saat ini istilah pedagang kaki lima juga digunakan untuk sekumpulan pedagang yang menjual

---

<sup>8</sup> <http://tugasakhiramik.blogspot.com/2013/05/pengertian-pembinaan.html> diakses tgl 28 juli 2019 pukul 21:00

<sup>9</sup> Departemen pendidikan dan kebudayaan , *Kamus Besar bahasa Indonesia*, (Balai pustaka, Jakarta 1990) h. 180

barang dagangannya di tepi-tepi jalan umum, trotoar, yang jauh dari kesan rapi dan bersih. Pengertian dari Pedagang kaki lima itu sendiri adalah orang dengan modal yang relatif kecil berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan, dan dilakukan di tempat-tempat yang dianggap strategis.

Pedagang Kaki Lima dalam bahasan ini adalah orang-orang yang berdagang dengan cara menggelar barang dagangan nya di tempat darurat dan sederhana seperti cukup dengan menggunakan bangku berkaki empat dan tenda terpal yang bisa di bongkar pasang .

Berdasarkan penjelasan judul diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud judul diatas secara keseluruhan adalah suatu penelitian yang membahas usaha pemerintah daerah dikecamatan pesisir tengah yang dalam hal ini di lakukan oleh DISKOPERINDAG ( Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan ) Kabupaten Pesisir Barat dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat

## **B. Alasan Memilih Judul .**

Adapun alasan yang melatar belakangi penulis memilih judul ini adalah sebagai berikut::

1. Masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak kunjung selesai di setiap daerah tidak kunjung selesai di setiap daerah di Indonesia, permasalahan ini muncul tiap tahun dan terus saja berlangsung tanpa ada solusi yang tepat dalam pelaksanaannya . keberadaan PKL kerap dianggap Ilegal karena menempati ruang public dan tidak sesuai dengan visi kota

sebagian besar menekankan aspek kebersihan , keindahan dan kerapihan kota . Oleh karena itu PKL seringkali menjadi target utama kebijakan-kebijakan pemerintah kota, seperti penggusuran dan relokasi. Hal ini merupakan masalah yang sangat kompleks karena menghadap dua sisi dilematis. Pertentangan antara kepentingan hidup dan kepentingan pemerintahan akan menimbulkan friksi diantara keduanya. Para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang umumnya masyarakat miskin mengharuskan mereka bertahan dalam suatu kondisi yang memperhatikan, dengan begitu banyak kendala yang harus di hadapi diantaranya kurang modal, tempat berjualan yang tidak menentu, kemudian ditambah dengan berbagai aturan seperti, adanya Perda yang melarang keberadaan mereka. Melihat kondisi yang seperti ini , maka seharusnya semua tindakan pemerintah didasarkan atas kepentingan masyarakat atau di tujukan untuk kesejahteraan rakyat atau dalam hal ini harus didasarkan pada asas oportunitas sesuai UU yang berlaku. Untuk itu penulis tertarik membahas upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam ini dilakukan Oleh DISKOPERINDAG dalam menata dan membina Pedagang kaki Lima di kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.

2. Bahwa lokasi penelitian dapat dijangkau dan di dukung oleh bahan literature yang cukup tersedia, sehingga penulis optimis penelitian ini dapat terlaksana tepat waktu dan skripsi ini dapat diselesaikan.

### C. Latar Belakang Masalah.

Pedagang Kaki Lima timbul sebagai akibat dari tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam memproduksi, bisa juga minimnya modal usaha yg tersedia. Masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak kunjung selesai di setiap daerah di Indonesia permasalahan ini muncul setiap tahun dan terus saja berlangsung tanpa ada solusi yang tepat dalam pelaksanaannya keberadaannya kerap dianggap illegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan, kerapihan kota atau sering kita dengan istilah 3K. oleh karena itu PKL seringkali menjai target utama kebijakan-kebijakan pemerintah kota seperti penggusuran dan relokasi.

Saat mereka berjualan, mereka mempunyai lebih banyak resiko daripada pedagang pasar. Resiko yang mereka hadapi diantaranya tidak laku, persaingan tidak sehat dari sesama PKL, musim hujan, isu-isu menyesatkan, penggusuran, dll. Resiko diatas menyebabkan mereka rentan. Kerentanan mereka antara lain menyangkut pada modal terbatas, kegiatan usaha subsisten, tidak adanya ijin usaha, dan ketiadaan jaminan tempat usaha, Memang tidak sedikit dari mereka yang menyadari bahwa berjualan pinggir jalan adalah illegal.

Yang kemudian mungkin agak berbeda adalah mereka yang bekerja memanfaatkan eksternalitas pasar, seperti kuli angkut, pedagang asongan, dan pekerja transport. Mereka pun rentan –bahkan sangat rentan- terhadap tidak adanya pekerjaan, pemalakan, dll. Resiko umum sebagai pedagang, seperti rusaknya barang dagangan, kurang laku, dan lain-lain, tidak bisa dikategorikan

sebagai permasalahan. Akar permasalahan kemiskinan di sector perdagangan, khususnya pedagang kecil di pasar dan PKL, berbeda. Bila tadi disebutkan bahwa permasalahan umumnya adalah banyaknya pungutan liar yang harus mereka bayarkan.

Bila kita kaji lebih jauh, permasalahan pungutan liar tersebut tidak serta merta muncul begitu saja. Dalam kasus PKL (termasuk pedagang asongan dan pedagang keliling), akar permasalahan pertama yaitu bahwa menjadi PKL bukan pilihan tanpa keterpaksaan. Bila dilihat mereka menjadi PKL sebagai pilihan terakhir, karena mereka gagal masuk di dunia kerja formal karena keterbatasan pendidikan, lapangan kerja, dll. Setelah gagal masuk ke dunia kerja formal, akhirnya mereka memilih berdagang yang tidak membutuhkan pendidikan..

Tapi kemudian permasalahan kedua menghadang mereka dalam hal modal. Untuk berdagang mereka membutuhkan modal yang besar untuk bisa mendapat tempat formal: dikios atau di pasar. Sampai saat ini tidak ada akses permodalan bagi mereka. Hanya rentenir atau keluarga yang bias memberi pinjaman modal.

Permasalah ketiga yaitu kurangnya infrastruktur untuk berdagang, dalam hal ini pasar atau lapangan khusus untuk berjualan. Akhirnya mereka berjualan di tempat umum yang bukan tempat berjualan. Dan keadaan ini yang dimanfaatkan oleh "oknum" aparat dan preman yang memperjualbelikan trotoar untuk mereka berjualan.

Permasalahan keempat adalah adanya anggapan negative dari pemerintah bahwa PKL adalah sesuatu yang harus diberantas karena mengganggu. Padahal yang harus disadari yaitu bahwa mereka itu berprofesi PKL karena tidak ada tempat yang bisa mewadahi mereka untuk berjualan. Profesi sebagai PKL telah terbukti sebagai jaring pengaman sosial yang mencegah mereka terjerumus lebih jauh dalam lembah kemiskinan.

Sementara bagi pedagang, tidak cukup relevan mengkategorikan mereka sebagai orang miskin. Namun bila kita melihat resiko "tidak normal" yang mereka hadapi sebagai pedagang, mereka layak dikategorikan sebagai orang yang rentan. Akar permasalahan yang mereka hadapi tidak banyak, hanya tidak adanya jaminan atas resiko tidak normal tersebut, seperti kebakaran, pemerasan preman.

Hal yang sama di hadapi oleh para Pedagang Kaki Lima dan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Khususnya di Kecamatan Pesisir tengah yaitu Pedagang Kaki Lima rata-rata berpendidikan rendah sehingga mereka hanya punya sedikit pilihan untuk mencari nafkah, pilihan mereka tidak lain merupakan pedagang kaki lima , mereka biasa berdagang di pasar pagi di dekat tugu merdeka pasar Krui dan juga bahu jalan di pasar pagi sehingga mengganggu lalu lintas dan juga mengganggu toko-toko yang berada di depannya, selain itu para pedagang ini tidak memiliki modal besar serta tidak adanya akses permodalan hanya rentenir atau keluarga yang bisa memberi pinjaman modal, kemudian tidak adanya infrastuktur untuk berjualan ini lah yang menjadi alasan mereka berjualan di tempat ramai seperti di pasar pagi dan

di kawasan labuhan jukung yang termasuk kawasan yang dilarang untuk berjualan bagi Pedagang Kaki Lima.

Pemerintah pusat telah mengeluarkan peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki lima yang kemudian ditindaklanjuti dengan di terbitkannya Peraturan Menteri Dalam negri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima. Dalam Permendagri disebutkan bahwa tujuan penataan dan pembinaan Pedagang kaki lima (PKL) adalah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya , menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri , dan mewujudkan kota yang bersih ,indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Dengan adanya Perpres nomor 125 tahun 2012 nomor 41 tahun 2012, maka Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten wajib melakukan Penataan dan pembinaan PKL di wilayah masing-masing. Salah satu amanat yang tercantum di dalam permendagri nomor 41 tahun 2012 adalah Bupati/Walikota menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntuknya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL . Penetapan lokasi atau kawasan tempat kegiatan usaha PKL dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Lokasi tempat kegiatan usaha PKL merupakan

lokasi binaan Bupati/walikota yang bersifat permanen atau sementara dan telah di lengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Sejalan dengan hal diatas Bupati/walikota juga diwajibkan untuk melakukan pembinaan terhadap PKL melalui peningkatan kemampuan berusaha , memfasilitasi akses permodalan, memfasilitasi akses bantuan sarana dagang , penguatan kelembagaan, fasilitasi peningkatan produksi, pengolahan , pengembangan, jaringan dan promosi, dan pembinaan dan bimbingan teknis, sedangkan pemberdayaan PKL yang membutuhkan fasilitas kerjasama antar Kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur

Pemerintah daerah pesisir barat mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 mengenai Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam pasal 6 ayat 1 tertulis bahwa untuk kepentingan pengembangan usaha pedagang kaki lima bupati berkewajiban melakukan pendataan dan memberikan pembinaan pada ayat 3 pembinaan yang dimaksud ayat 1 adalah meliputi bimbingan penjualan , mengupayakan pemberian tempat berjualan yang layak , memberikan teguran apabila PKL melakukan pelanggaran peraturan kemudian pada ayat ke 4 dalam pelaksanaan pendataan dan pembinaan Bupati menunjuk Dinas Koperasi,UKM Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Koperasi,UKM Perindustrian dan Perdagangan salah satu dinas yang dinaungi oleh tiga Kementrian yaitu Kementrian Koperasi, Kementrian



Perindustrian, dan Kementrian Perdagangan dinas inilah yang bertugas melakukan penertiban dan pembinaan kepada PKL berdasarkan peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016.

Diskoperindag khususnya di bidang perdagangan mempunyai fungsi pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pendataan, pendaftaran dan pengelolaan retribusi pasar dan pedagang kaki lima

Berdasarkan Penjelasan diatas penulis tertarik meneliti upaya pemerintah kecamatan Pesisir tengah Kabupaten Pesisir barat dalam hal ini melalui DISKOPERINDAG merealisasikan Program daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam membina PKL di wilayah Kecamatan Pesisir Tengah.yang kemudian akan di tuangkan di dalam karya Ilmiah ini.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalh dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Upaya Pemerintah daerah dalam Membina Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan yang akan di capai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam membina pedagang kaki lima di kecamatan pesisir tengah kabupaten Pesisir Barat.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian ilmiah yaitu:

### a. Jenis Penelitian dan sifat penelitian

#### 1). Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*Field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam keadaan yang sebenarnya.<sup>10</sup> Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan pemerintah dalam membina pedagang kaki lima yang ada dikecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.

#### 2). Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang menggambarkan secara tepat dan benar dan sifat-sifat secara individu , gejala, keadaan dan situasi kelompok tertentu atau menetapkan frekuensi adanya hubungan tertentu suatu gejala dalam masyarakat.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Kartini kartono,*pengantar metodologi riset sosial*, (mandar maju, Bandung , Cetakan ke VIII,1996), h. 32

<sup>11</sup> Koentjaraningrat, *metode-metode penelitian masyarakat*,(Gramedia pustaka, Jakarta,1998), h. 93

Menurut Jalaludin Rakhmat, Penelitian diskriptif, bukan mencari atau menjelaskan hubungan ,dan juga tidak menguji hipotesa atau membuat prediksi penelitian ini di tujukan untuk:

- a) Mengumpulkan informasi actual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada
- b) Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek yang berlaku
- c) Membuat perbandingan yang berlaku
- d) Menentukan apa yang di lakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menentukan rencana dan keputusan pada waktuyang akan datang<sup>12</sup>

Penelitian ini menggambarkan secara benar dan tepat tentang upaya pemerintah daerah dalam pembinaan pedagang kaki lima di kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.

### 3). Populasi dan Sampel

- (a). Populasi merupakan keseluruhan dari jumlah subjek yang di teliti, populasi disebut juga Univers tidak lain dari daerah generalisasi yang diwakili oleh sampel<sup>13</sup>.

Populasi pada penelitian ini adalah

---

<sup>12</sup> Jalaludin Rakhmat, *metodologi penelitian komunikasi*, ( Remaja Rosdakarya, Bandung,1996), h 24-25

<sup>13</sup> Wahdi Bachtiar, *metode ilmu dakwah* ,(Logos, Jakarta 1997), h 6

(1). seluruh pegawai dinas yang ada di DISKOPERINDAG Kabupaten Pesisir Barat.

(2). PKL di seluruh kecamatan Pesisir Tengah yang berjumlah 84 orang pedagang yang berjualan di pasar dan di pinggiran pantai daerah wisata labuhan jukung Krui Pesisir Barat.

b). Sample

Sampel adalah sebagian Individu yang mewakili populasi yang di selidiki<sup>14</sup> ,sampel merupakan sebagian dari jumlah individu yang mewakili populasi dimana karakteristiknya akan di teliti.

Jumlah penelitian yang akan di teliti ini cukup banyak dan dari jumlah ini tidak mungkin dapat di hubungi melalui wawancara secara keseluruhan , maka dalam penelitian ini menggunakan sampel.

Cara menentukan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan purposive sampel, karena penelitian ini bersifat monografis dan melukiskan apa adanya , maksud dari purposive sampling yaitu penelitian sekelompok subyek yang didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-tertentu yang di pandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan cirri-ciri atau sifat-sifat populasi yang diketahui sebelumnya.

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Alfabeta, Bandung:2014)h.215

Dikarenakan jumlah populasi penelitian cukup banyak, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini

- (1) Satu orang pegawai di DISKOPERINDAG yaitu bapak Burhanuddin S.H selaku Kasi Perdagangan dalam Negeri Informan inti dalam penelitian ini, sedangkan sample dari PKL 4 orang yaitu terdiri dari,
- (2). Bapak Rizal pedagang es alpuk
- (3). Bpk Suwardi pedagang es dungan
- (4). Bapak Hasan pedagang Ikan laut
- (5) Bapak Samsul Rahman pedagang bakso

#### 4). Metode pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam menghimpun data dari lokasi ini adalah sebagai berikut:

##### (a) Metode Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung. Observasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data langsung dari objek penelitian, tidak hanya terbatas pengamatan saja melainkan juga pencatatan guna memperoleh data-data yang lebih konkrit dan jelas<sup>15</sup>. Dalam hal ini penulis langsung terjun kelapangan dan mengamati secara langsung yang terjadi di lapangan. Jenis observasi yang penulis pilih adalah jenis

---

<sup>15</sup> Ahsanuddin Mudi, *Profesional Sosiologi*, (Jakarta: Mendiata, 2004), h.44

observasi non partisipan , yaitu peneliti tidak ikut aktif dalam subjek yang di teliti.

(b) Metode interview (wawancara)

Interview adalah metode pengumpulan data yang di peroleh dengan tanya jawab yang di kerjakan secara sistematis dari dua orang berdasarkan kepada tujuan penelitian. Pada umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik. Dalam proses tanya jawab masing-masing pihak dapat mengajukan pertanyaan secara wajar lancar<sup>16</sup>. Adapun interview yang penulis gunakan adalah bebas terpimpin yaitu penginterview membawa kerangka pertanyaan-pertanyaan untuk disajikan . metode interview digunakan sebagai metode bantu untuk mendapatkan data tentang bagaimana pembinaan yang dilakukan pemerintah kecamatan pesisir tengah kabupaten pesisir barat seperti mengamati , mencatat secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang berkaitan dengan penelitian

(c) Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Dokumentasi adalah nama

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h 3

lain dari dokumen ,buku essay , buku teks , surat kabar, artikel, novel, majalah, politik , iklan, gambar nyata.

Metode dokumentasi ini adalah salah satu jenis komunikasi visual dapat dianalisis dengan berbagai cara<sup>17</sup> . Metode dokumentasi ini di gunakan sebagai metode pelengkap, dalam pelaksanaannya metode dokumentasi ini untuk mengetahui tentang program telah dilakukan pemerintah daerah mengenai pemberdayaan PKL di wilayah kabupaten pesisir Barat khususnya di kecamatan pesisir tengah.

#### 5). Metode Pengolahan dan Analisis data

Analisa data adalah proses yang membawa bagaimana data diatur , mengorganisasi apa yang ada kedalam sebuah pola , kategori, dan suatu urutan dasar<sup>18</sup>. Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisa data ini menguraikan , menafsirkan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistematis. Untuk menyajikan data tersebut agar lebih bermakna dan mudah di pahami adalah menggunakan *thematic analysis* dari Miles dan Huberman.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian kualitatif Teori &Praktik* ( Jakarta: Bumi Aksara,2013),h. 176

<sup>18</sup> Michel Qunn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar), h. 250

<sup>19</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian kualitatif analisis data* ( Jakarta: Rajawali Pers, 2010) h.129

Dalam model ini kegiatan analisis di bagi 3 tahap, yaitu pengumpulan data, penyajian data , dan penarikan kesimpulan.

(a). Tahap Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman , Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan , dan transpormasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan .Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama penelian berlangsung<sup>20</sup> dalam tahap ini peneliti mencoba memilah data yang relevan dengantujuan dan masalah penelitian. Tujuannya adalah untuk mencari tahu hal bagaimana upaya pemerintah daerah Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten pesisir Barat dalam membina Pedagang kaki lima.

(b)Tahap Penyajian data

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan .<sup>21</sup> Penyajian data ini digunakan sebagai bahan untuk menafsirkan dan mengambil kesimpulan atau biasanya dalam penelitian kualitatif di kenal dengan istilah inferensi yang merupakan

---

<sup>20</sup> Etta Mamang Sengadji, *Metode Penelitian* ( Yogyakarta:CV andi offset, 2010)h.199

<sup>21</sup> *Ibid*, h 200



makna terhadap data yang terkumpul dalam rangka menjawab dari suatu permasalahan.

(d) Tahap Verifikasi Data / Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagai kegiatan dari konfigurasi utuh. Kesimpulan di verifikasi selama kegiatan berlangsung. Verifikasi mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis suatu tinjauan ulang catatan pada lapangan<sup>22</sup>. Simpulan tersebut merupakan pemaknaan terhadap data yang telah di kumpulkan oleh peneliti. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan responden dengan makna yang terkandung dalam masalah secara konseptual.

Dalam tahapan ini peneliti akan menginterpretasikan data-data yang didapat berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian. Namun dalam proses ini peneliti akan menggunakan analisis data dengan beberapa tahapan, yaitu pertama dengan cara membaca hasil dari pada kegiatan pengumpulan data kedua dengan cara melengkapi data yang kiranya masih kurang, ketiga menginterpretasikan data berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 250

## **BAB II**

### **PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

#### **A. Kebijakan Publik**

Kebijakan publik biasanya memberi perhatian terhadap masalah-masalah publik, sehingga untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pemerintah memiliki alat yaitu sebuah kebijakan. Masalah publik terjadi apabila melibatkan banyak orang dan mempunyai akibat, akibat tersebut tidak hanya terjadi pada orang-orang yang secara langsung terlibat, tetapi juga sekelompok orang lain yang secara tidak langsung juga ikut terlibat<sup>1</sup>

Sejak pasca Perang Dunia II, kata *Policy* mengandung makna kebijakan sebagai sebuah *rationale*, yaitu penilaian penuh pertimbangan. Sehingga bagi Wayne Parsons, kebijakan adalah usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan dan tidak melakukan suatu tindakan<sup>2</sup>

Istilah kebijakan publik sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan akademis, istilah kebijakan ini mungkin digunakan secara luas seperti “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, atau “kebijakan pertanian di negara-negara berkembang atau negara-negara dunia ketiga”. Namun, istilah kebijakan dipakai untuk menunjuk sesuatu yang lebih khusus, seperti, kebijakan pemerintah.

Terdapat banyak definisi mengenai kebijakan publik. Menurut Anderson

---

<sup>1</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori & Proses* (Yogyakarta: Media Presindo, 2007), hal 77

<sup>2</sup> Wayne Parsons, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan* (Jakarta: Kencana, 2006), hal 15

kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah<sup>3</sup>

Sedangkan dalam pandangan Woll, kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk menyelesaikan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui lembaga yang mempengaruhi masyarakat. Menurut Woll, dalam pelaksanaan kebijakan publik terdapat tiga hal yang berpengaruh sebagai implikasi dari tindakan pemerintah. *Pertama*, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kehidupan masyarakat. *Kedua*, adanya *output* dalam bentuk program untuk masyarakat. *Ketiga*, adanya dampak kebijakan untuk kehidupan masyarakat<sup>4</sup>

Keberadaan kebijakan publik merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap warga, karena dengan adanya kebijakan publik dapat mencapai kesejahteraan rakyat. Kebijakan publik biasanya berkaitan dengan aturan-aturan yang dibuat dan dilaksanakan oleh suatu negara sebagai sebuah tindakan pemerintah. Lingkup kebijakan publik begitu luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan, seperti kebijakan publik dibidang pendidikan, pertanian, kesehatan, dan sebagainya. Apabila dilihat dari hirarkinya, sebuah kebijakan publik dapat bersifat regional, nasional, maupun lokal.<sup>5</sup> Bentuk-bentuk kebijakan publik di Indonesia beraneka ragam, mulai dari Undang-Undang Dasar (UUD), Undang- Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

---

<sup>3</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori & Proses*, Yogyakarta 2012 hal 21

<sup>4</sup> Hesel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus* (Yogyakarta: Lukman Offset dan YPASI, 2003), hal 2

<sup>5</sup> Hesel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus*, hal 3.

Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda), dan lain-lain<sup>6</sup>

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Perbup No. 40 Tahun 2016 merupakan salah satu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah Pesisir barat terkait pembinaan dan penataan pedagang kaki lima di daerah pesisir barat khususnya yang penulis teliti di kecamatan pesisir tengah.

## **B. Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan, sesungguhnya implementasi kebijakan bukan hanya sekedar mengenai mekanisme penjabaran suatu keputusan melainkan merupakan keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari kebijakan tersebut. Oleh sebab itu, implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Seperti apa yang dikatakan Chief J. O. Udoji bahwa: “Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan lebih penting dari pada pembuatan kebijaksanaan, karena apabila tidak ada implementasi kebijakan

---

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

maka kebijakan hanya akan berupa impian atau terencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip.”<sup>7</sup> Karena itu, setiap kebijakan dan program yang telah direncanakan oleh pemerintah perlu diimplementasikan sehingga tidak menjadi hal yang sia-sia.

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah sebuah cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan.<sup>8</sup> Tahapan implementasi kebijakan berhubungan dengan apa yang terjadi setelah perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan kewenangan pada suatu kebijakan dan membentuk output yang jelas, sehingga kebijakan tersebut dapat memperoleh hasil melalui program pemerintah<sup>9</sup>

### **1. Faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan**

Dalam keberhasilan implementasi kebijakan pasti akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Pada penelitian ini peneliti merujuk pada pemikiran George C. Edwards. Menurut George C. Edwards, ada empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan<sup>10</sup> yaitu,

#### **a. Komunikasi.**

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan. Implementasi kebijakan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada

---

<sup>7</sup> Dr. Solichin Abdul Wahab, *Analisis kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal 7.

<sup>8</sup> Riant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2003),hal 158

<sup>9</sup> Hesel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan Publik yang Membumi*,2003, hal 9

<sup>10</sup> Subarsono, AG, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal 90.

sasaran dan pihak yang terkait. Selain itu, informasi yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan harus jelas, mudah dipahami, dan konsisten agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

b. Sumber Daya.

Sumber daya merupakan faktor penting dalam melaksanakan suatu kebijakan, karena walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tersebut, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi pelaksana kebijakan tersebut dan sumber daya non manusia, yakni seperti sumberdaya finansial, dan fasilitas. Sumber daya memang merupakan suatu hal yang penting, karena tanpa adanya sumber daya kebijakan hanya tinggal dikertas dan menjadi dokumen saja.

c. Disposisi atau perilaku pelaksana kebijakan.

Watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan merupakan salah satu bagian dalam menjalankan suatu kebijakan, apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka pelaksana kebijakan pun akan melaksanakan kebijakan dengan baik.

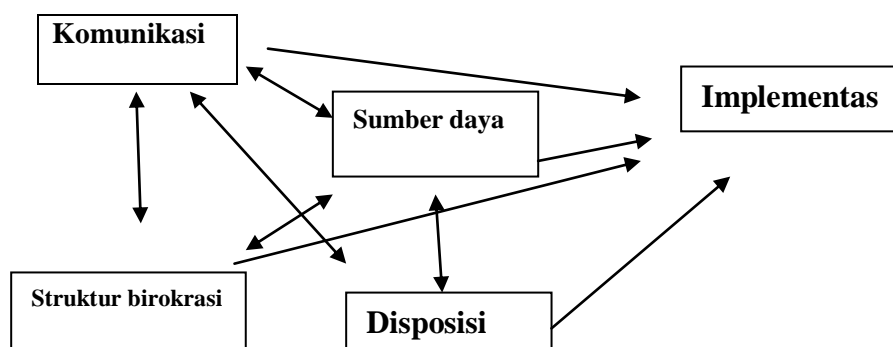
d. Struktur birokrasi

merupakan salah satu badan yang menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi yang dimaksud di sini tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga berada dalam institusi atau organisasi- organisasi yang terkait dalam kebijakan tersebut. Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang cukup

signifikan terhadap sebuah implementasi kebijakan. Dalam struktur birokrasi terdapat dua hal yaitu, *Standar Operating Prosedurs* (SOP) dan Fragmentasi, berikut penjelasannya:

- 1) SOP merupakan prosedur kerja ukuran dasar atau pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam melaksanakan sebuah kebijakan agar sesuai dengan tujuan kebijakan.
- 2) Fragmentasi merupakan struktur birokrasi yang terlalu panjang dan desentralisasi kekuasaan. Dengan adanya hal tersebut akan mengakibatkan lemahnya pengawasan dan menyebabkan struktur birokrasi yang rumit, hal tersebut dapat terjadi karena adanya tekanan-tekanan di luar unit birokrasi seperti kelompok kepentingan, pejabat eksekutif, dan sebagainya.

(Tabel Teori George C Edwards)



Berdasarkan pemaparan di atas, pada saat setelah dibuatnya sebuah kebijakan maka kebijakan tersebut perlu untuk diimplementasikan. Sama halnya dengan kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten pesisir Barat terkait Perbup No. 40 Tahun 2016, peneliti menggunakan teori George C. Edward untuk mengetahui apakah Perda tersebut telah berjalan dengan baik atau

belum dalam membina pedagang kaki lima

### **C. Pembinaan pedagang kaki lima**

#### **1. Pengertian Pembinaan**

Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan dan pelaksanaan suatu pekerjaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan lebih baik<sup>11</sup>. Sedangkan menurut Masdar Helmi adalah segala usaha, ikhtiar, dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara terarah dan teratur.<sup>12</sup>

Pembinaan juga dapat diartikan bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang di tujukan kepada orang atau sekelompok orang melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan.<sup>13</sup>

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa dalam pembinaan terdapat unsur tujuan, materi proses, cara, pembaharuan, dan tindak pembinaan. Selain itu untuk melaksanakan kegiatan pembinaan diperlukan adanya perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian (monitoring dan evaluasi).

Secara operasional pembinaan yang di maksud skripsi ini adalah kegiatan pemerintah daerah pesisir barat dalam perencanaan, pengorganisasian, pengendalian (Monitoring dan Evaluasi) kepada pedagang kaki lima di kawasan kecamatan pesisir tengah.

---

<sup>11</sup> Ensiklopedia Indonesia vol 2, Jakarta, hal 890

<sup>12</sup> Masdar Helmi *Dakwah Alam dalam Pembangunan I.* (Semarang Toha Putra, 1971), h.132

<sup>13</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta, Teras 2009), h.144



a. Perencanaan

Perencanaan adalah proses penentuan atau sasaran yang hendak di capai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefektif mungkin.<sup>14</sup> Menurut Louis A. Allen, perencanaan terdiri atas aktivitas yang dioperasikan oleh seorang manajer untuk berfikir ke depan dan mengambil keputusan saat ini, yang memungkinkan untuk mendahului serta menghadapi tantangan pada waktu yang akan datang. Berikut ini aktivitas perencanaan yang dimaksud.

1) Prakiraan (*forecasting*)

Prakiraan adalah merupakan suatu usaha yang sistematis untuk meramalkan/ memperkirakan waktu yang akan datang dengan penarikan atas fakta yang telah diketahui.

2) Penetapan tujuan (*establishing objective*)

Penetapan tujuan merupakan suatu aktivitas untuk menetapkan sesuatu yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pekerjaan.

3) Pemrograman (*programming*)

Pemrograman adalah suatu aktivitas yang dilakukan dengan maksud untuk menetapkan:

- a) Langkah-langkah yang utama yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan
- b) Unit dan anggota yang bertanggung jawab untuk setiap langkah
- c) Urutan dan serta pengaturan waktu setiap langkah

---

<sup>14</sup> Nanang fatah, *Landasan manajemen pendidikan* (Bandung , Rosdakarya, 2009), h 49

4) Penjadwalan (*scheduling*)

Penjadwalan adalah penetapan atau penunjukan waktu menurut kronologi tertentu guna melaksanakan berbagai macam pekerjaan.

5) Penganggaran (*budgeting*)

Penganggaran merupakan suatu aktivitas untuk membuat pernyataan tentang sumber daya keuangan yang disediakan untuk aktivitas dan waktu tertentu

6) Pengembangan prosedur (*developing procedure*)

Pengembangan prosedur merupakan suatu aktivitas menormalisasikan cara, teknik, dan metode pelaksanaan suatu pekerjaan.

7) Penetapan dan interpretasi kebijakan (*establishing and interpreting*)

Penetapan dan interpretasi kebijakan adalah suatu aktivitas yang dilakukan dalam menetapkan syarat berdasarkan kondisi mana manajer dan para bawahannya akan bekerja. Suatu kebijakan adalah sebagai suatu keputusan yang senantiasa berlaku untuk permasalahan yang timbul berulang demi suatu organisasi.<sup>15</sup>

Menurut Siagian (1977) dalam buku Mesiono, Manajemen Organisasi proses perencanaan dapat dilihat dari tiga dimensi yaitu:

- 1) Mengetahui sifat-sifat dari ciri-ciri suatu rencana yang baik.
- 2) Mengandung proses perencanaan sebagai rangkaian perencanaan yang harus dijawab dengan memuaskan

---

<sup>15</sup> Siswanto, Pengantar Manajemen, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hal. 45-46

- 3) Memandang proses perencanaan sebagai suatu masalah yang harus dipecahkan secara ilmiah.<sup>16</sup>

Berdasarkan tiga dimensi proses perencanaan tersebut yang dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

1	Sifat-sifat dan ciri-ciri	Mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk
2	Proses perencanaan sebagai suatu sistem	Segala sesuatu harus dijawab dengan memuaskan pihak-pihak tertentu.
3	Proses perencanaan sebagai suatu masalah	Harus dipecahkan secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan

#### b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah kumpulan orang dengan system kerja sama untuk mencapai tujuan bersama.<sup>17</sup> Dengan kata lain, pengorganisasian adalah pelaksanaan suatu kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya

#### c. Pengendalian (monitoring)

Monitoring adalah bagian dari pengawasan, dalam pengawasan ada aktifitas memantau (monitoring). Pemantauan umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu, untuk memeriksa apakah program yang telah berjalan itu sesuai dengan sasaran atau sesuai dengan tujuan dari program. Jadi kegiatan monitoring ini bisa dilaksanakan dengan cara memantau dan mengecek dari aktifitas kegiatan pembinaan

<sup>16</sup> Mesiono, *Manajemen dan Organisasi*, (Bandung: Citapustaka, 2012), hal. 19

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 71

## 2. Pembinaan Sebagai Program dan Proses

Jika di lihat dari bidang-bidang yang terlibat dalam suatu pembinaan upaya pembinaan ini juga dapat dilihat dari sisi keberadaannya sebagai suatu program atau pun suatu proses, pembinaan suatu program dimana pembinaan dilihat dari tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan, yang biasanya sudah ditentukan jangka waktunya , konsekuensi dari hal ini , bila program ini selesai dianggap program telah selesai dilakukan . Hal ini banyak terjadi dengan system pembangunan berdasarkan proyek yang banyak di kembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah , dimana yang satu dengan yang lainnya kadangkala tidak berhubungan , meskipun itu pada lembaga yang sama sedangkan pada beberapa organisasi non pemerintah kegiatannya juga tidak jarang terputus karena telah berakhir dari pihak pendonor.

Pembinaan merupakan upaya untuk memberdayakan seorang maupun kelompok masyarakat tertentu, Hogan menggambarkan proses pemberdayaan berkesinambungan sebagai suatu siklus yang terdiri dari tahapan utama sebagai suatu siklus yang terdiri dari tahapan utama, yaitu:

- a. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan
- b. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan ketidakberdayaan
- c. Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek
- d. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan
- e. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikan nya

Dari siklus diatas akan tergambar mengapa Hogan meyakini proses pemberdayaan yang terjadi tidaklah berhenti pada satu titik tertentu , tetapi lebih merupakan sebagai upaya berkesinambungan untuk meningkatkan daya yang ada. Meskipun Hogan memfokuskan tulisannya pada pemberdayaan yang bersifat *on going process* tersebut bukan berarti tidak dapat diterapkan pada level komunitas.

Keberadaan pandangan yang melihat pembinaan ini sebagai suatu program dan sebagai suatu proses diatas memberikan sumbangan tersendiri terhadap pemahaman tentang pemberdayaan , terutama yang berkaitan dengan diskursus komunitas , peran yang harus dijalankan oleh pelaku perubahan atau pun fasilitator. Sebagai fasilitator, keberadaan agen pengubah tidak mutlak harus hadir terus menerus pada suatu kelompok sasaran . fasilitator lebih berfungsi untuk membuat agar kelompok sasaran menjadi lebih pandai sehingga nantinya dapat mengembangkan kelompok mereka sendiri bila sudah tiba saatnya program telah selesai.

Menurut sedarmayanti ada dua kecenderungan proses pembinaan PKL di suatu kota yaitu kecenderungan Primer dan kecenderungan Sekunder. Kecenderungan Primer , yaitu menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan , kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar menjadi usaha yang lebih berdaya, sebagian dengan membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi . sementara kecenderungan sekunder, yaitu menekankan pada proses dialog . sedangkan pendekatannya menggunakan tiga bentuk, yaitu:

- a. Pendekatan sosial budaya, yaitu pendekatan pembinaan yang lebih yang mengedepankan sikap toleransi tinggi.
- b. Pendekatan Ekonomi, yaitu pendekatan pembinaan yang menekankan kepada segala upaya yang berhubungan dengan pengembangan usaha .
- c. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang menyangkut perihal kepatuhan terhadap peraturan-peraturan daerah<sup>18</sup>.

### **3. Strategi Pembinaan Pedagang Kaki Lima**

Secara umum pembinaan adalah sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang di rencanakan , dalam hal ini pembinaan yang di maksud adalah bagaimana komunitas yang di bina dapat diberdaya karena keberdayaan komunitas masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan dalam pengertian dinamis dapat mengembangkan diri untuk mencapai tujuan.

Dalam hal ini upaya yang dilakukan untuk membina suatu masyarakat agar dapat berdaya secara ekonomis harus di lakukan melalui tiga strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu:

- a. Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi daya yang dapat di kembangkan
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering) dalam rangka ini di perlukan langkah-langkah lebih positif dan

---

<sup>18</sup> Sedarmayanti. *Tata kerja dan Produktivitas: Suatu tinjauan dari Aspek ekonomi*. Bandung: CV Mandar Maju. 2011 h.75

nyata, penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin dalam berdaya memanfaatkan peluang.

- c. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi dalam proses pemberdayaan yaitu menambah daya kekuatan individu supaya tidak lemah<sup>19</sup>

Pembinaan yang dilakukan agar suatu komunitas masyarakat berdaya seperti diatas mempunyai dua arah yaitu strategi pertama adalah memberi peluang agar sector masyarakat modern dapat tetap maju, oleh karena itu kemajuan di butuhkan untuk pembangunan bangsa secara keseluruhan .Strategi kedua adalah memberikan perhatian yang lebih banyak terhadap lapisan masyarakat yang masih tertinggal dan hidup diluar atau dipinggiran jalur hidup modern. Strategi kedua inilah yang perlu lebih di kembangkan yang intinya adalah bagaimana masyarakat menengah kebawah dibantu untuk mandiri dan berdaya , sehingga tidak hanya dapat meningkatkan kapasitas produksi dan kemampuan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya tetapi juga meningkatkan ekonomi nasional.

Dalam melakukan perencanaan harus ada partisipasi aktif dari lapisan masyarakat khususnya Pedagang Kaki Lima di kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.

Agar suatu masyarakat khusus disini Pedagang Kaki Lima mempunyai kemampuan untuk memberdayakan dirinya sendiri, meningkatkan kualitas

---

<sup>19</sup> Gunawan Sumodiningrat, *memberdayakan masyarakat*, (Jakarta: Penakencana Nusadwipa, 1996) cet. Ke-1 h. 20

hidupnya maka harus ada kesadaran bahwa mereka harus berusaha sendiri untuk meningkatkan taraf hidupnya , selain adanya kesadaran harus ada kemauan berbuat selanjutnya harus ada keyakinan bahwa mereka mampu berbuat,dengan demikian di perlukan pengetahuan praktis, keterampilan, serta ,kemampuan kerja sama kelompok lain.

Menurut Frans Wiryanto jomo , untuk memberikan daya kepada ,masyarakat maka perlu ada strategi-strategi yang harus di tempuh sebagai berikut:

- a. Melakukan Inventarisasi masalah yang dirasakan masyarakat yang akan di berdayakan serta harapan mereka
- b. Mmpelajari aturan-aturan yang ada mengenai pemberdayaan sector tersebut, termasuk fasilitas apa yang disediakan pemerintah atau lainnya bila kita memberdayakan atau mengembangkan sector tersebut.
- c. Melakukan persuasi agar anggota komunitas yang sudah diyakinkan bahwa mereka harus berusaha meningkatkan kualitas hidupnya,mengatasi sendiri masalahnya mengusahakan sendiri harapan-harapannya
- d. Melakukan motivasi yaitu menggerakkan anggota komunitas yang sudah diyakini bahwa mereka harus berusaha sendiri meningkatkan kualitas hidupnya, agar bukan hanya mereka sadar melainkan juga mau berbuat
- e. Penyusunan (perencanaan) program kerja ini hendaklah kelompok kerja sendiri dengan menerima masukan itu sendiri dengan aparat pemerintah daerah



- f. Penyusunan kelompok-kelompok kerja, suatu kelompok kerja mengenai suatu pemberdayaan
- g. Memberikan pengetahuan praktis mengenai sector yang di kembangkan melalui penyuluhan dan sebagainya
- h. Pemberian keterampilan melalui pelatihan dan sebagainya
- i. Pemberian pengalaman nyata dilapangan dalam pengembangan masyarakat dalam proyek percontohan
- j. Pemberian fasilitas berupa informasi, penyertaan, bantuan material,perangsang dan penunjukan konsultasi teknis.
- k. Pemberian pengetahuan praktis evaluasi kerja pemberdayaan (pembangunan) masyarakat diantaranya evaluasi proses,evaluasi pencapaian target,evaluasi pemberdayaan.<sup>20</sup>

#### **D. Pedagang Kaki Lima**

##### **1. Pengertian Pedagang Kaki Lima**

Pedagang kaki lima adalah pedagang golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan modal yang relative kecil. Istilah kaki lima diambil dari pengertian tempat di tepi jalan lebarnya lima kaki. Tempat ini umumnya terletak ditrotoar, depan toko dan tepi jalan . Ada yang menyatakan bahwa istilah pedagang kaki lima berasal dari orang

---

<sup>20</sup> Frans Wiryanto Jomo,*Membangunan Masyarakat*. (Bandung:Alumni. 1986), h.83-84.

yang berdagang yang menggelar barang dagangannya, mereka cukup menyediakan tempat darurat, seperti bangku-bangku yang biasanya berkaki empat, ditambah dengan sepasang kaki pedagangannya sehingga berjumlah lima maka timbulah julukan pedagang kaki lima<sup>21</sup>

## 2. Sejarah Pedagang Kaki Lima

Manusia berdagang sebagai mata pencaharian. perdagangan pertama kali terjadi, yang pasti sudah ada sejak nenek moyang dahulu, ribuan tahun lalu. Sementara itu, tentang kemunculan pedagang kaki lima (PKL) bisa dirunut hingga ke masa penjajah Belanda di Indonesia. Istilah “kaki lima” pun pertama kali muncul di masa penjajah Belanda.<sup>22</sup>

Jika mengikuti sejarah, mestinya sebutannya adalah “pedagang lima kaki”, sesuai dengan luasnya trotoar yang di buat pemerintah Belanda.

Asal usul istilah pedagang kaki lima (PKL) sebenarnya masih simpang siur dan banyak versi. Jika berpatokan pada trotoar lima kaki (1,5 meter) yang di buat Belanda, lalu bagaimana dengan pedagang yang menggunakan gerobak atau pikulan. Padahal mereka juga termasuk PKL. Mereka sebenarnya tidak berjualan ditrotoar atau emperan toko, mereka di sebut PKL<sup>23</sup>

Terdapat beberapa asal usul penyebutan istilah PKL. Salah satunya dari trotoar buatan Belanda yang luasnya 1,5 meter (lima kaki), seperti yang

---

<sup>21</sup> Buchari Alma, *Kewirausahaan*, Alfabeta, Bandung, 2005, h.140

<sup>22</sup> Permadi Gilang, S.S, *Pedagang Kaki Lima Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, (Jakarta: Yudhistira, 2007) Cet 1, h. 2

<sup>23</sup> *Ibid* h. 3

disebutkan di atas. Itu pun sebenarnya tidak begitu tepat. Menurut seorang tokoh Indonesianis bernama William Liddle, aturan trotoar lima kaki justru berasal dari bahasa Inggris, *five foot* (lima kaki). Bapak Liddle mempercayai bahwa yang membuat aturan tentang pembangunan trotoar di Indonesia bukanlah Belanda, tetapi Inggris. Inggris memang pernah mengambil alih kekuasaan atas Indonesia dari Belanda. Yang membuat trotoar di Indonesia adalah gubernur jenderal asal Inggris, Sir Stamford Raffles.<sup>24</sup>

Sementara, menurut sumber lain, istilah PKL adalah untuk menyebut pedagang yang menggunakan gerobak beroda. Jika roda gerobak ditambahkan dengan kaki pedagang, maka berjumlah lima, maka disebutlah pedagang kaki lima atau PKL. Lalu jika kita membuka kamus umum bahasa Indonesia yang disusun oleh WJS Poerwadarminta dikutip oleh Permadi Gilang, S.S, makna istilah kaki lima itu mempunyai arti “lantai (tangga) di muka pintu atau di tepi jalan” dan “lantai di beri beratap sebagai penghubung rumah dengan rumah”<sup>25</sup>

Pengertian tersebut lebih mirip dengan pengertian trotoar yang luasnya lima kaki atau 1,5 meter yang dibuat di masa penjajahan (belanda atau inggris). Namun, pengertian yang dimaksudkan kamus itu juga bisa diartikan emperan toko. Karenanya, selain trotoar, PKL juga berjualan di emperan toko. Ada juga yang membuat istilah lain. Kaki lima diartikan “kanan kiri lintas manusia.” Maksudnya karena PKL berada di jalur pejalan kaki (trotoar dan emperan toko), sehingga banyak orang berlalu- lalang disamping kanan dan samping kiri para

---

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *Ibid.*,h. 4.

PKL.<sup>26</sup>

Adapun beberapa pengertian PKL (pedagang kaki lima) menurut para ahli yaitu:

- a. Ray Bromley dikutip oleh Ramli Rusli pada umumnya sering di gambarkan sebagai wiraswasta yang independen dan dengan demikian bagian terbesar dari mereka adalah pekerja yang tidak digaji. Keberhasilannya sangat tergantung pada usahanya dan kemampuan menarik pembeli.<sup>27</sup>
- b. Paul Bairoch dikutip oleh Ramli Rusli berpendapat pedagang kaki lima di gambarkan sebagai perwujudan usaha tersembunyi, atau pun sebagai pekerja sederhana yang bertambah secara luar biasa<sup>28</sup>
- c. Soetjipto Wirosardjono dikutip oleh Ramli Rusli berpendapat pedagang kaki lima berpola kegiatan tidak teratur, baik waktu maupun modal dan pemasukanya. Omset biasanya kecil dan di hitung harian, serta tidak di sentuh peraturan pemerintah.<sup>29</sup>

### **3. Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima**

Kegiatan usaha pedagang kaki lima mempunyai hubungan yang sangat penting dengan pembeli yang bersifat komersil dalam artian bahwa pendekatan

---

<sup>26</sup> *Ibid* h.5

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 31.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*,h. 64

pada kegiatan usaha dagang terlepas dari hubungan yang bersifat pribadi atau hubungan tetangga. Tidak tetapnya atau sering berpindahnya tempat, menyebabkan pula bahwa hubungan antara pembeli dengan PKL sering hanya hubungan sepintas lalu atau lebih merupakan hubungan yang tidak disengaja atau terjadinya karena kebetulan saja. Pedagang kaki lima selalu berusaha agar barang dagangannya terjual dan untuk itu pedagang akan memilih tempat berjualan yang dipandang sesuai, juga dipilih waktu tertentu yang banyak didatangi para pengunjung<sup>30</sup>

Pedagang kaki lima sebagai kelompok yang melayani kebutuhan masyarakat, pada dasarnya terlibat didalam proses niaga dilihat dari kegiatan pekerjaannya sehari-hari. Proses niaga disini dapat berarti menyalurkan atau menjadi salah satu mata rantai yang menghubungkan produsen kepada konsumen melalui barang atau jasa yang dijualnya kepada anggota masyarakat yang membutuhkannya. Barang ataupun jasa tersebut biasanya langsung ditujukan kepada konsumen akhir atau pemakai langsung, sehingga dengan demikian PKL merupakan mata rantai terakhir yang berhubungan dengan konsumen<sup>31</sup>

Selain itu terdapat kegiatan menyimpan secara terorganisir yang sering dikenal dengan arisan, sudah lebih banyak dipraktekan dikalangan pedagang kaki lima. Cara simpanan arisan ini disebut sebagai suatu bentuk budaya sosial yang tradisional serta dapat merangsang dan membina orang menjadi anggota

---

<sup>30</sup> Ramli Rusli “*Sektor informal perkotaan pedagang kaki lima*” (Jakarta:Ind-Hill.co, 1992), h. 93.

<sup>31</sup> *Ibid.*,h. 101

dalam sistem ekonomi yang lebih modern. Karena arisan pada dasarnya mempunyai maksud untuk menyimpan uang modal usaha dan dapat mempererat hubungan kekeluargaan antara pesertanya<sup>32</sup>

Dalam kegiatan usaha pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk kegiatan UKM (usaha kecil menengah), kegiatan UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan yang penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik disektor tradisional maupun modern. Peranan usaha kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh 2 departemen, yaitu Departemen Perindustrian dan Perdagangan, serta Departemen Koperasi dan UKM. Namun demikian, usaha pengembangan yang telah dilaksanakan masih belum memuaskan hasilnya, karena pada kenyataannya kemajuan UKM sangat kecil dibandingkan dengan kemajuan yang sudah dicapai usaha besar. Pelaksanaan kebijaksanaan UKM oleh pemerintah selama orde baru, sedikit saja yang dilaksanakan, lebih banyak hanya merupakan semboyan saja, sehingga hasilnya sangat tidak memuaskan. Pemerintah lebih berpihak pada pengusaha besar hampir semua sektor, antara lain perdagangan, perbankan, kehutanan, pertanian, dan industri.

Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, karena semakin terbukanya pasar didalam negeri, merupakan ancaman bagi UKM dengan semakin banyaknya barang dan jasa yang masuk dari luar akibat dampak

---

<sup>32</sup> *Ibid.*,h. 135-136

globalisasi. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan UKM saat ini dirasakan semakin mendesak dan sangat strategis untuk mengangkat perekonomian rakyat, maka kemandirian UKM di harapkan dapat tercapai dimasa mendatang. Dengan berkembangnya perekonomian rakyat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja, dan memakmurkan masyarakat secara keseluruhan<sup>33</sup>

#### **4. Letak Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima**

Letak lokasi usaha pedagang kaki lima menjadi sangat penting untuk kegiatan berdagang. Bentuk tempat dagangan para pedagang kaki lima beraneka ragam. Tenda merupakan bentuk yang paling banyak dijumpai, mengingat bahwa tenda sebagai tempat dagangan dapat melindungi PKL dari sengatan panas maupun hujan. Bentuk-bentuk tempat dagangan lainnya adalah kotak, meja, gelaran, pikulan, gerobak dorong maupun sepeda.

Bentuk tempat dagangan tersebut pada umumnya disesuaikan dengan jenis barang dagangan masing-masing serta lokasi usahanya. Barang-barang kelontong misalnya, tempat dagangannya dapat saja berupa gelaran, apabila lokasi tempat usahanya misalkan saja ditrotoar, namun apabila lokasinya terletak dipinggir jalan masuk ke pasar, mungkin gerobak dorong lebih sesuai sebagai tempat dagangan bagi pedagang lainnya.

Bentuk tempat dagangan ini dibuat sedemikian rupa agar mudah dan cepat dapat dipindahkan, terutama pada saat terjadinya penertiban atau

---

<sup>33</sup> Dr. Sartika Tiktik Partomo M.S, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah & Koperasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 20.

pengusiran PKL oleh petugas-petugas pemerintah kota. Letak lokasi usaha untuk menempatkan dagangannya, pada umumnya adalah ditepi jalan, trotoar, bahkan sering mengambil sebagian dari jalan umum yang sebenarnya bukan di peruntukan sebagai tempat berjualan. Lokasi-lokasi semacam itu dianggap strategis karena merupakan tempat-tempat umum yang ramai dan banyak dilalui orang, sekaligus juga merupakan calon pembeli dari barang dagangannya. Apabila terjadi pengusiran atau penertiban terhadap PKL, maka biasanya PKL akan berpindah untuk sementara waktu ke lokasi lain dan kemudian kembali lagi ke lokasi semula apabila petugas-petugas pemerintahan kota telah pergi<sup>34</sup>

## **5. Karakteristik Pedagang Kaki Lima**

Pedagang kaki lima merupakan usaha perdagangan dalam rangka mencari keuntungan yang dilakukan secara tidak tetap, dengan kemampuan yang terbatas dan tempat usaha di pusat-pusat konsumen yang tidak memiliki izin usaha. Kriteria dari pedagang kaki lima, adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan usaha , tidak terorganisir secara baik
- b. Tidak memilliki izin usaha
- c. Tidak teratur dalam kegiatan usaha , baik ditinjau dari tempat usaha

---

<sup>34</sup> Ramli Rusli “*Sektor informal perkotaan pedagang kaki lima*” (Jakarta:Ind-Hill.co, 1992), h. 123-124.



maupun jam kerja.

- d. Bergerombol di trotoar, atau di tepi-tepi jalan protokol, di pusat-pusat dimana banyak orang ramai
- e. Menjalankan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang sambil berlari mendekati konsumen<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Buchari Alma, *kewirausahaan*, Alfabeta, Bandung, 2005, h.140

**BAB III**

**PEMERINTAHAN KECAMATAN PESISIR TENGAH DALAM  
PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

**A. Pemerintahan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat**

**1. Monografi Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat**

Kecamatan Pesisir Tengah dengan Ibu Kota Kelurahan Pasar Krui resmi menjadi wilayah Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2012 tentang pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung.

Kecamatan Pesisir Tengah yang pada mulanya merupakan wilayah kewedanan Krui yang di bentukl pada kwartal pertama tahun 1949. Dengan wilayah berasal dari wilayah kecamatan Pesisir Utara dan Kecamatan Pesisir Selatan. Dalam perjalanan kewedanan Krui yang ketika itu berada dalam pengawasan kabupaten ogan komering ulu propinsi sumatera selatan , kemudian terjadi perubahan kembali , hal ini terjadi karena masyarakat kewedanan krui memilih bergabung dengan pemerintah kabupaten Dati II Lampung Utara .

Selanjutnya ketika Usulan Pembentukan daerah Tingkat II Lampung Barat mulai Dirintis , Kecamatan Pioner dari 6 (Enam) Kecamatan Induk yang Ada Saat Itu. Seiring dengan dinamika pemerintahan dan perkembangan kehidupan masyarakat , maka tahun 1990 kecamatan Pesisir Tengah dimekarkan dan melahirkan kecamatan perwakilan Karya Penggawa.

Berangkat dari kondisi yang ada dan memperhatikan aspirasi yang berkembang, juga dalam rangka mendekatkan pelayanan masyarakat kecamatan Pesisir Tengah. Mengusulkan Kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar Kecamatan Pesisir Tengah di bentuk Kembali dua kecamatan baru yakni kecamatan Way Kruai dan Kruai selatan.

Dengan segala perjuangan dari Masyarakat dari kecamatan pesisir tengah khususnya Masyarakat yang berada di wilayah utara dan selatan kecamatan pesisir tengah, maka kecamatan Way Kruai dan Kruai Selatan secara Resmi di bentuk dan terpisah dari kecamatan pesisir tengah berdasarkan Peraturan daerah No 02 tahun 2010 tanggal 15 April 2010.

## **2. Kondisi Wilayah**

### **a. Gambaran Umum**

Kecamatan Pesisir Tengah resmi menjadi wilayah Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat. Dan dengan di bentuknya Kecamatan Way Kruai dan Kecamatan Kruai Selatan berdasarkan Perda Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2010, maka wilayah Kecamatan Pesisir Tengah memiliki batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Way Kruai.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kruai Selatan
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia

4) Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Balik bukit lampung Barat<sup>1</sup>

Wilayah kecamatan pesisir tengah memiliki luas 120,64 Km<sup>2</sup> . Peruntukan wilayah kecamatan Pesisir Tengah sebagian besar adalah digunakan untuk lahan pertanian dan perkebunan dan sisanya terbagi dalam berbagai peruntukan seperti pemukiman Penduduk , Pariwisata, Perdagangan , Perikanan , Peternakan , Fasilitas Umum, dan lain-lain. Untuk lebih lengkap pembagian wilayah di kecamatan Pesisir tengah sebagai Berikut ini:

**Tabel I**  
**Luas Kecamatan Pesisir Tengah Per Pekon**

No	Nama Pekon	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
1	Way Redak	13,30
2	Seray	18,41
3	Kampung Jawa	20,05
4	Rawas	9,49
5	Suka Negara	16, 18
6	Pahmungan	17,20
7	Kelurahan Pasar Krui	19,40
8	Kelurahan Pasar Kota Krui	6,61
Jumlah		120,64

Sumber: *Monografi Kecamatan Pesisir tengah tahun 2017* dicatat tanggal 28 juli2019

<sup>1</sup> Sumber data kantor kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat

Berdasarkan keterangan diatas Pekon Kampung Jawa dan kelurahan Pasar Krui merupakan daerah yang paling luas diantara pekon yang lain dengan luas wilayah 20,05 Km dan 19,40 Km. Sedangkan kelurahan Pasar kota krui merupakan daerah yang paling kecil wilayah dibandingkan wilayah lain di kecamatan Pesisir Tengah dengan luas wilayah 6,61 Km.

**Tabel II**  
**Jumlah Penduduk Menurut Pekon dan Jenis Kelamin**

NO	PEKON/ DESA	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Way Redak	502	464	966
2	Seray	864	803	1667
3	Kampung Jawa	1138	1142	2280
4	Rawas	993	812	1805
5	Kelurahan Pasar Krui	2828	2665	5493
6	Suka Negara	470	424	894
7	Pahmungan	562	591	1153
8	Kelurahan Pasar Kota Krui	2451	2190	4641
Jumlah/Total		9808	9091	18899

Sumber: *Demografi Kecamatan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017* Dicatat tanggal 28 Juli 2019

Berdasarkan keterangan diatas Kelurahan Pasar Kota Krui dan Kampung Jawa merupakan daerah yang paling besar jumlah penduduknya dibandingkan daerah yang lainnya yaitu dengan jumlah 4641 jiwa dengan rincian laki-laki 2451

dan perempuan 2190 sedangkan Kampung Jawa berjumlah 2280 jiwa dengan rincian laki-laki 1138 jiwa dan perempuan 1142 jiwa . sedangkan Sukanegara merupakan pekon dengan jumlah penduduk paling kecil dibandingkan pekon lainnya di kecamatan pesisir tengah dengan jumlah penduduk 894 jiwa dengan rincian laki-laki 470 jiwa dan perempuan 424 jiwa.

**Tabel III**  
**Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk**  
**Menurut Pekon Di Kecamatan Pesisir Tengan**

No	Pekon/ Desa	Luas Area (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
1	Way Redak	2.79	966	346
2	Seray	2.25	1667	741
3	Kampung Jawa	3.45	2280	661
4	Rawas	4.64	1805	389
5	Pasar Krui	3.63	5493	1513
6	Suka Negara	3.28	894	273
7	Pahmungan	9.83	1153	117
8	Pasar Kota Krui	1.39	4641	3339
Jumlah/Total		31.26	18899	605

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Barat, Proyeksi Penduduk 2010 – 2020 dicatat tanggal 28 Juli 2019*

Berdasarkan keterangan diatas walaupun wilayah Kelurahan Pasar Kota Krui merupakan daerah yang paling kecil luas areanya dibandingkan pekon yang lain namun Kelurahan Pasar Kota Krui merupakan wilayah yang paling padat

jumlah penduduknya dibandingkan dengan pekan yang lainnya, dengan kepadatan penduduk 3339 jiwa/Km<sup>2</sup>, sedang rata-rata kepadatan Penduduk di Kecamatan Pesisir Tengah adalah 605 jiwa/Km<sup>2</sup>.

**Tabel IV**  
**Banyaknya Sarana Perekonomian Per Pekan di Kecamatan Pesisir Tengah**

NO	Pekon/Desa	Pasar	Pertokoan	KUD/Koperasi Usaha Desa	Bank	Rumah Makan
1	Way Redak	0	0	0	0	0
2	Seray	0	1	0	0	1
3	Kampung Jawa	0	0	0	0	0
4	Rawas	1	1	0	0	0
5	Pasar Krui	1	175	1	4	8
6	Sukanegara	0	0	0	0	0
7	Pahmungan	1	0	0	0	0
8	Pasar Kota Krui	0	0	0	0	6
Jumlah		3	177	1	4	15

Sumber: *Monografi kecamatan Pesisir Tengah tahun 2017* dicatat tanggal 28 juli 2019

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pusat perbelanjaan terbesar berada di daerah pasar krui dengan banyaknya sarana perekonian seperti toko yang jumlahnya 175 serta terdapatnya Bank negri maupun swasta yaitu BRI, BNI Bank

Lampung dan juga Bank Mandiri serta penunjang ekonomi yang lain ada KUD (Koperasi Usaha Desa) Selalau .

b. Geografi

Letak kecamatan Pesisir tengah Pada Koordinat: 05°02'18 Lintang Selatan dan 103°56'05" Bujur timur.

c. Topografi

Secara Topografi Kecamatan Pesisir Tengah merupakan Daerah dataran Rendah cenderung berbukit  $\pm$  0-700 MDPL , yang terdiri dari lahan kering , persawahan, pertanian dan perkebunan dengan suhu rata-rata 25-30°c

d. Iklim

Menurut Oldeman, Irsal L Darwis (979), akibat pengaruh dari rangkaian bukit barisan , maka kecamatan Pesisir Tengah Memiliki iklim dimana Jumlah bulan basah > 9 bulan.Berdasarkan Curah Hujan dari lembaga Meteorologi dan Geofisika curah hujan Kecamatan Pesisir Tengah berkisar antara 2500 – 3000 milimeter setahun.

### **3.Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat**

a.Kondisi pedagang kaki lima di kecamatan pesisir tengah kabupaten pesisir barat kecamatan pesisir tengah kabupaten pesisir barat merupakan kecamatan terpadat di kabupaten pesisir barat dan juga pusat perdagangan di kabupaten termuda di propinsi lampung ini, banyak pendatang dari luar daerah yang ingin mencoba keberuntungan dengan cara berjualan atau berdagang, berdagang disini dengan



cara memasarkan barang dagangannya menggunakan gerobak atau tenda buatan selayaknya atau disebut dengan istilah pedagang kaki lima

Dari data Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat jumlah pedagang kaki lima yang menempati di wilayah ini berjumlah 84 pedagang kaki lima baik yang menggunakan gerobak, tenda buatan atau yang menggelar barang dagangannya hanya menggunakan meja di pinggir jalan.

**Tabel V**  
**Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Pesisir Tengah**

No	Jenis Usaha	Jumlah (Jiwa)
1	Pedagang Buah	12
2	Pedagang Minuman	18
3	Pedagang Sayuran	12
4	Pedagang Kelontongan	5
5	Pedagang Makanan	17
6	Pedagang asesoris	5
7	Pedagang ikan	15
Jumlah		84

Sumber: *Data DISKOPERINDAG Kecamatan Pesisir tengah Tahun 2018* dicatat tanggal 30 juli 2019

Setelah penulis melakukan interview kepada beberapa pedagang kaki lima faktor pendukung dan penghambat pengembangan usaha di kecamatan pesisir tengah kabupaten pesisir barat sebagai berikut :

1) Faktor yang mendukung pengembangan usaha bagi pedagang kaki lima di kecamatan pesisir tengah diantaranya:

a) Harga barang yang di jual relative murah , sehingga banyak masyarakat yang minat berbelanja dagangannya.

Harga yang di maksud disini yaitu harga makanan atau barang dagangan yg di jual pedagang kaki lima lebih murah di bandingkan dengan harga yg di jual di supermarket atau kios-kios yang ada disekitarnya

b) Banyak masyarakat sekitar yang suka terhadap makan siap saji , yang dimaksud makanan siap saji adalah makanan yang seperti ini biasanya langsung datang di tempat lesehan yang disediakan pedagang kaki lima

c) Jangkauan dari tempat tinggal atau perumahan mudah dan cepat

d) Lokasi penjualan strategis . manfaat lokasi yang strategis bisa menjadi daya tarik konsumen atau pembeli , mempermudah konsumen untuk mencari atau membeli barang dagangannya.<sup>2</sup>

2) Adapun faktor yang jadi penghambat dalam pengembangan usaha pedagang kaki lima di kecamatan pesisir tengah kabupaten pesisir barat diantaranya:

a) Mahalnya biaya sewa tempat usaha seperti ruko , kios kios sehingga pedagang tidak mampu menyewa tempat tersebut

b) Keterbatasan modal usaha

c) Tidak mempunyai tempat usaha yang layak sehingga pedagang menggunakan tempat yang di larang.

---

<sup>2</sup> Wawancara Pribadi kepada Bapak Hasan dicatat tanggal 9 Mei 2019

- d) Keterbatasan mencari biaya untuk penambahan modal karena menurut dari sejumlah pedagang biasanya pihak peminjam minta surat jaminan usaha
- e) Tidak mempunyai surat ijin usaha karena biasanya pedagang berpindah pindah tempat berdagang
- f) Pedagang baru atau pesaing baru karena biasanya memperlambat dalam pengembangan usaha

Dari keterangan diatas, faktor faktor ini menjadi pengaruh terhadap pengembangan usaha pedagang kaki lima di kecamatan pesisir tengah kabupaten pesisir barat

### 3) Aktifitas Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat

Sehari harinya pedagang berjualan untuk memasarkan barang dagangannya yaitu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup keluarga , berhubungan dengan kebutuhan sandang , pangan, papan , serta untuk biaya pendidikan bagi mereka yang sudah mempunyai anak yang sudah bersekolah juga untuk kebutuhan materi lainnya

Kegiatan pedagang kaki lima dilakukan setiap hari dan waktunya pun berbeda-beda ada yang berangkat 7:00 wib sampai dengan 17: 00 wib pak hendra berjualan es buah mulai pukul 9:00 wib -16:00 wib ada pula yang berangkat berjualan mulai jam 09:00-22:00 wib umumnya pedagang buah buahan , pedagang kelontongan atau aksesoris biasanya beraktifi mulai dari jam 09:00-20:30,dan pada umumnya pedagang yang menggunakan gerobak untuk memasarkan barang dagangannya mulaiberaktifitaspada siang atau sore hari ,

yaitu siang dari jam 16:00-23:00 wib. Aktifitas pedagang yang ada di wilayahkecamatan pesisir tengah pada umumnya dilakukan kurang lebih 7 – 9 jam setiap harinya, aktifitaspedagang ini sangat membantu memberikan kebutuhan bagi keluarga mereka.<sup>3</sup>

## **B. Gambaran Umum Diskoperindag Kabupaten Pesisir Barat**

Dinas Koperasi, Industri , UKM dan Perdagangan Kabupaten Pesisir Barat adalah salah satu Dinas yang di naungi oleh tiga Kementrian Yaitu Kementian Koperasi , Kementrian Industri, Kementrian Perdagangan. Dinas inilah yang menjadi pelaksana tugas dari kebijakan pemerintah didalam pembinaan dan penataan Pedagang kaki lima sesuai dengan Peraturan Bupati no 40 tahun 2016 ayat 4.

### **1. Tugas Pokok dan Fungsi Diskoperindag Kabupaten Pesisir Barat**

Dalam Pemberdayan serta pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pesisir Barat khususnya di kecamatan Pesisir Tengah Pemerintah daerah Pesisir Barat memberikan Kewenangan Kepada DISKOPERINDAG sebagai dinas yang menangani secara khusus terhadap bidang koperasi, perindustrian serta perdagangan ,

Berdasarkan peraturan Bupati kabupaten Pesisir Barat No 40 tahun 2016 tentang kedudukan , susunan organisasi , tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi perindustrian dan perdagangan memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang koperasi , perindustrian dan perdagangan

---

<sup>3</sup> Hasil Observasi penulis dilokasi penelitian

## **2. Fungsi Diskoperindag Kabupaten Pesisir Barat**

- a. Penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
- b. Perumusan Kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Koperasi dan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan urusan pemerintahan di bidang perdagangan
- c. Pelaksanaan pelayanan, pembinaan dan pengendalian urusan pembinaan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang koperasi dan urusan pemerintahan perindustrian dan urusan pemerintahan di bidang perdagangan
- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang koperasi dan urusan pemerintahan dibidang perindustrian dan urusan pemerintahan di bidang perdagangan
- e. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembinaan dan ketertiban pasar dan pedagang kali lima
- f. Pelaksanaan kesekretariatan dinas ,dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>4</sup>

## **3. Visi Dan Misi Diskoperindag Kabupaten Pesisir Barat**

- a. VISI
- b. Terwujudnya Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) Perindustrian dan perdagangan yang professional, beriman dan bertakwa serta berwawasan lingkungan dan berkesinambungan.

---

<sup>4</sup> Sumber data dari diskoperindag Kabupaten Pesisir Barat.

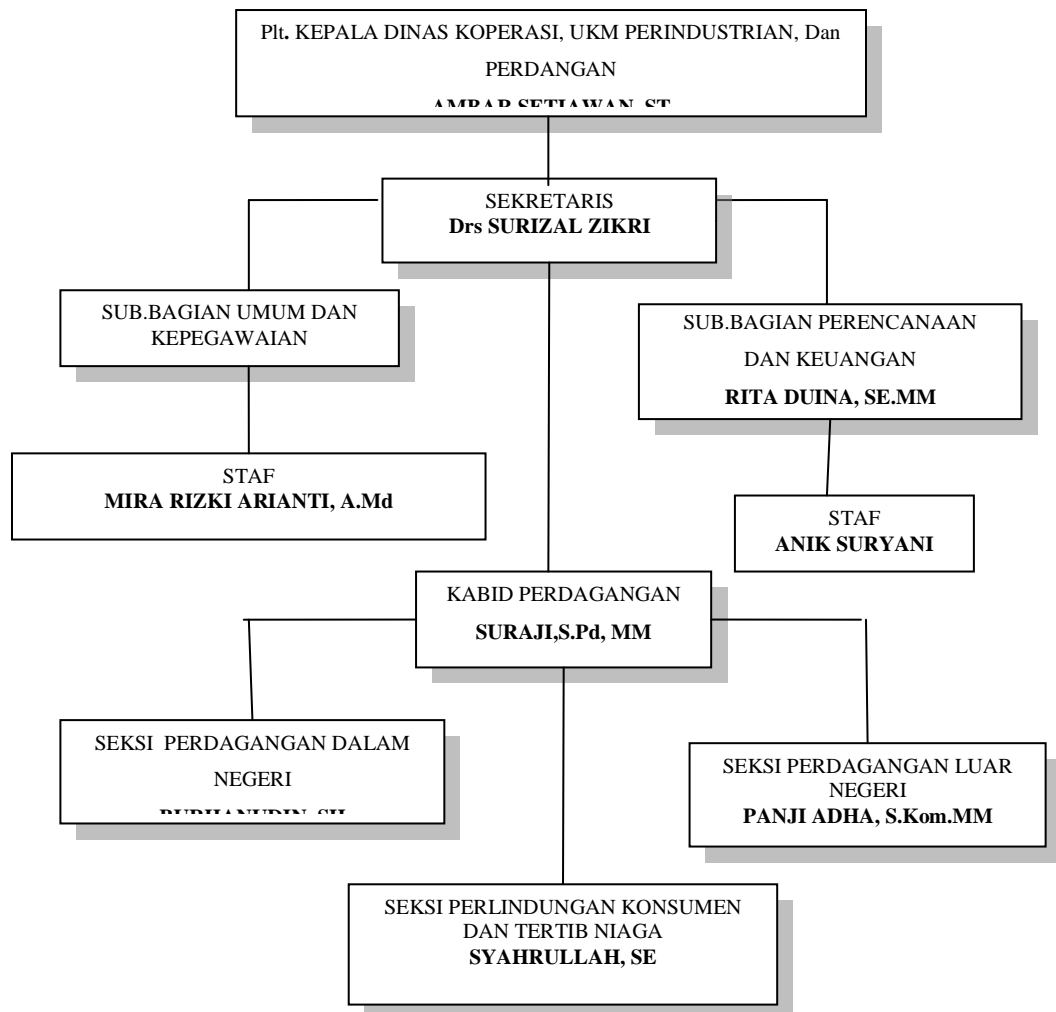
c. MISI

- 1) Meningkatkan Peran Kelembagaan dan aparatur dalam perluasan jangkauan dan mutu pelayanan
- 2) Mengembangkan kewirausahaan dan daya saing ekonomi , usaha mikro kecil, dan menengah (KUMKM)
- 3) Memperkuat klaster agroindustri berbasis kompetisi inti daerah serta peningkatan kemampuan dan peran IKM berbasis daya local
- 4) Meningkatkan peran perdagangan dalam daerah melalui peningkatan pengawasan dan perlindungan konsumen, promosi dagang dan penciptaan iklim investasi yang kondusif.
- 5) Mewujudkan kelembagaan pasar yang refrensetatif guna peningkatan kualitas jangkauan pelayaann dan peningkatan pendapatan asli daerah.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Sumber Data dari DIskoperindag Kabupaten Pesisir Barat

#### 4. Struktur Organisasi Diskoperindag<sup>6</sup>



#### 5. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepegawaian Diskoperindag

- a. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan.

Tugas:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan
- 2) Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas

<sup>6</sup> Sumber data Diskoperindag Kabupaten Pesisir Barat

- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perindustrian dan perdagangan
- 4) Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan
- 5) Penyelenggaraan urusan dibidang perindustrian
- 6) Penyelenggaraan urusan dibidang fasilitasi dan pengembangan industri kecil menengah
- 7) Penyelenggaraan urusan di bidang perdagangan luar negeri
- 8) Penyelenggaraan urusan di bidang perdagangan dalam negeri
- 9) Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

b. Sekretaris

Tugas:Menyelenggarakan pelayanan administrasi, hukum, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan umum serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Fungsi :

- 1) Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi pelayanan administrasi
- 2) Penyusunan perencanaan operasional dan pelaporan kegiatan
- 3) Penyelenggaraan urusan hukum dan kepegawaian
- 4) Penyelenggaraan urusan perencanaan dan keuangan
- 5) Penyelenggaraan urusan umum
- 6) Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas

c. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan



- 1) Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan program Dinas, evaluasi dan pelaporan yang meliputi Bidang Perindustrian, Bidang Fasilitasi dan Pengembangan IKM, Bidang Perdagangan Dalam Negeri, dan Bidang Perdagangan Luar Negeri
- 2) Melaksanakan penyusunan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Perencanaan dan Program
- 3) Melaksanakan pengendalian pelaksanaan rencana dan program Dinas dan UPTD
- 4) Melaksanakan penyusunan laporan meliputi Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LPPD, dan LKPJ Dinas
- 5) Melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas
- 6) Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas
- 7) Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan Daerah serta pembayaran lainnya
- 8) Melaksanakan perbendaharaan keuangan
- 9) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan
- 10) Melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPTD
- 11) Melaksanakan verifikasi keuangan
- 12) Melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan
- 13) Melaksanakan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan

- 14) Menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti laporan akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan
- 15) Menyusun dan melakukan usul perubahan anggaran
- 16) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
- 17) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

d. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Tugas :

- 1) Melaksanakan penyusunan, dan pengolahan data kepegawaian
- 2) Melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas
- 3) Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta cuti, sumpah/janji, tugas/ijin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional
- 4) Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai
- 5) Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai
- 6) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan Dinas

- 7) Melaksanakan penyusunan bahan rancangan sosialisasi dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan
- 8) Menyiapkan bahan pertimbangan hukum, melaksanakan telaahan hukum dan melakukan bantuan hukum.
- 9) Menyelenggarakan administrasi kenaikan pangkat, pemindahan, pemberhentian, gaji berkala, kartu pegawai, karis/karsu, askes, taspen, NPWP, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 10) Melaksanakan evaluasi kehadiran dan administrasi kinerja dalam pemberian tunjangan
- 11) Membuat Daftar Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan
- 12) Fasilitasi pemberian bahan pembuatan DP3
- 13) Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/ naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan
- 14) Menggandakan dan mendistribusikan surat menyurat
- 15) Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat
- 16) Melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian
- 17) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/ perawatan

lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor

- 18) Menyusun daftar inventaris, arsip dan dokumentasi
- 19) Melaksanakan pengawasan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
- 20) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

e. Kabid Perdagangan

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan

Fungsi : penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan seksi dan pejabat non struktur dalam lingkup perdagangan

f. Seksi Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Tugas :

- 1) Bina Pasar dan Distribusi
- 2) Pengawasan, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
- 3) Pengembangan Kelembagaan Usaha dan Promosi

Fungsi :

- 1) Pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya
- 2) pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan

kegiatan pendataan, pendaftaran dan pengelolaan retribusi pasardan pedagang kali lima

- 3) Pengkoordinasian, pembagian dan pengaturan pelaksanaan tugas
- 4) Penyelenggaraan urusan bina pasar dan distribusi
- 5) Penyelenggaraan urusan Kelembagaan Usaha dan Promosi
- 6) Penyelenggaraan urusan Pengawasan, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

g. Seksi Bidang Perdagangan Luar Negeri

Tugas : Melakukan urusan dibidang ekspor dan impor, promosi, iklim usaha dan investasi dan kerjasama kelembagaan internasional serta tugas lain yang diberikan kepala dinas.

Fungsi :

- 1) Pemberian pelayanan administrasi di lingkungannya
- 2) Penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan
- 3) Memahami kebijakan dan peraturan di bidang perdagangan luar negeri
- 4) Pengkoordinasian, pembagian dan pengaturan pelaksanaan tugas
- 5) Evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan
- 6) Penyusunan informasi potensi sektor perdagangan

- 7) Penyusunan data ekspor dan impor daerah
- 8) Menyiapkan perumusan kebijakan teknis fasilitas, koordinasi dan pembinaan teknis di bidang ekspor dan impor serta pengembangan pasar luar negeri
- 9) Penyelenggaraan urusan ekspor dan impor
- 10) Penyelenggaraan urusan promosi, iklim usaha dan investasi
- 11) Penyelenggaraan urusan kerjasama kelembagaan internasional

#### h. Seksi Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga

Tugas :

- 1) Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas
- 2) Menyusun bahan pembinaan dan bimbingan teknis
- 3) Meningkatkan dan mendorong upaya perlindungan usaha konsumen dan konsumen
- 4) Menyampaikan informasi dan peraturan tentang pengawasan dan perlindungan konsumen
- 5) Melaksanakan tugas pengawasan terhadap barang beredar dan jasa
- 6) Melaksanakan tugas pengawasan terhadap pengadaan dan distribusi barang dalam pengawasan
- 7) Melaksanakan tugas pengawasan terhadap perizinan barang perdagangan

- 8) Menerima pengaduan konsumen
- 9) Membuat dan menyusun laporan kegiatan
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang.<sup>7</sup>

### **C. Upaya Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat**

Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan dan pelaksanaan suatu pekerjaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan lebih baik. atau segala usaha, ikhtiar, dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara terarah dan teratur. Maka di dalam proses pembinaan pemerintah harus menyusun perencanaan tertentu demi memecahkan masalah dan mencapai tujuan. Begitu pula pemerintah daerah kabupaten Pesisir Barat dalam pembinaan Pedagang Kaki Lima. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Diskoperindag Dibawah ini merupakan tahapan-tahapan mulai dari perencanaan pelaksanaan dan juga monitoring dalam pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pesisir Barat

#### **1. Perencanaan**

Perencanaan adalah proses penentuan atau sasaran yang hendak di capai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefektif mungkin. Dari data yang penulis peroleh dari Diskoperindag bahwa perencanaan pembinaan pedagang kaki lima dilakukan dengan beberapa tahap mulai dari pembentukan tim efektif dalam penyusunan dan perumusan peraturan daerah

---

<sup>7</sup> Sumber Data dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pesisir Barat dicatat Tanggal 29 Juli 2019

pelaksanaan kebijakan sampai kepada pengendalian atau monitoring pembinaan pedagang kaki lima berikut dibawah ini tabel perencanaan pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pesisir Barat.

**Tabel VI**  
**Tahapan Perencanaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pesisir Barat**

No	Tahapan dan Capaian Antara	Output	Stake holders	Waktu	Peran Project Leader
<b>Jangka Pendek</b>					
1	<p><b>Pembentukan Tim Efektif.</b></p> <p>a. Rapat internal Diskoperindag membentuk Tim Efektik Struktur Organisasi Pelaksana Kegiatan.</p> <p>b. Membentuk Tim Efektik Penyusunan Perbup Penataan PKL dan SOP Diskoprindag</p> <p>c. Penyusunan draf SK Bupati, Pembahasan Draft SK</p>	Terbentuknya Tim Efektif dengan Keputusan Bupati Pesisir Barat..	Diskoperindag, Bagian Hukum.	Minggu ke IV September 2016  Sampai dengan Minggu I Oktober 2016	Memimpin Rapat, Nara Sumber dan mengarahkan Tim untuk bekerja efektif karena keterbatasan waktu



	<p>Bupati tentang Tim Efektif</p> <p>d. Koreksi SK Bupati di Bagian Hukum Setda</p> <p>e. Penandatanganan Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Efektif</p>				
2	<p><b>Konsultasi kepada Mentor/ Sekretaris Daerah.</b></p> <p>a. Melaporkan dan menjelaskan rencana pembuatan Perbup SOP Penegakan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Pesisir Barat dan Perbup tentang Penataan dan Pembinaan PKL.</p> <p>b. Mohon persetujuan dan dukungan.</p>	<p>Persetujuan penyusunan Perbup dan kesediaan dukungan anggaran.</p>	<p>Project Leader dan Sekretaris Daerah</p>	<p>Minggu I Oktober 2016</p>	<p>Menghadap mohon petunjuk dan pengarahan Bapak Sekda</p>

3.	<p><b>Penyusunan Draf Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pembinaan PKL.</b></p> <p>a. Rapat Koordinasi Tim Penyusunan Draft Perbup Penataan PKL.</p> <p>b. Penyerapan aspirasi Perbup Pembinaan PKL.</p> <p>c. Rapat Pembahasan draft Perbup Penataan PKL dengan OPD.</p> <p>d. Rapat Finalisasi Perbup</p> <p>e. Koreksi Raperbup di Bag. Hukum</p> <p>f. Penandatanganan Perbup oleh Bupati.</p>	Tersusunnya Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penataan dan Pembinaan Kaki Lima.	<p>Tim Efektif.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Satpol PP</li> <li>- Bag. Hukum</li> <li>- DPU</li> <li>- LH</li> <li>- DKK</li> <li>- Diskoperindag</li> </ul>	Minggu I s/d IV Oktober 2016	Nara Sumber dan Memantau pelaksanaan rapat penyusunan Perbup.
----	---	--	--	------------------------------	---

4.	<p><b>Penyusunan SOP Penegakan Perundang-undangan Daerah.</b></p> <p>a. Rapat Koordinasi Internal Satpol PP dan penyusunan draf SOP.</p> <p>b. Rapat Pembahasan Draft Perbup SOP dengan tim OPD.</p> <p>c. Koreksi Perbup SOP di Bagian Hukum</p> <p>d. Penanda tanganan Perbup SOP oleh Bupati,</p>	Tersusunnya SOP Penegakan Perundang-undangan Daerah.	Satpol PP, Bag. Hukum, PPNS, Polres  Korwas PPNS	Minggu I s/d IV Mei 2017	Nara Sumber dan memantau jalannya rapat dan pembahasan SOP Satpol PP
5.	<p><b>Pendataan PKL Kabupaten Pesisir Barat.</b></p> <p>a. Rapat intern Diskoperindag</p> <p>b. Pelaksanaan Pendataan PKL</p>	Terdatanya semua PKL yang akan di adakan penataan	Diskoperindag	Minggu I s/d II Juni 2017	Memantau pelaksanaan pendataan.

6.	<p><b>Sosialisasi Peraturan Bupati tentang penataan dan pembinaan PKL Kecamatan Pesisir Tengah:</b></p> <p>a. Rapat Internal Diskoperindag Persiapan Sosialisasi.</p> <p>b. Penyusunan materi sosialisasi.</p> <p>c. Pelaksanaan sosialisasi</p>	Tersosialisasinya Perbup tentang penataan dan pembinaan PKL kepada PKL dan Masyarakat.	Satpol PP, Diskoperindag, LH, DPU, Bagian Hukum, Camat Pesisir Tengah, LSM, PKL.	Bulan Juni 2017	Nara bersama tim sosialisasi
7.	<p><b>Pelaksanaan Penataan PKL Kabupaten Pesisir Barat.</b></p> <p>a. Rapat koordinasi dengan stakeholders</p> <p>b. Penataan PKL dalam satu kawasan di Kecamatan Pesisir Tengah</p>	Tertatanya PKL dengan tertib, rapi, indah dan nyaman.	Satpol PP, Dishub, Diskoperindag, DPU, LH, Bag, Hukum, Camat Pesisir Tengah.	Minggu III s/d IV Juni 2017	Memimpin langsung saat penataan.

8.	<b>Patroli Wilayah Memantau Kegiatan PKL Setelah Penataan.</b> a. Pengawasan. b. Inventarisasi Permasalahan c. Pembinaan non formal kepada PKL	Terjaminnya para PKL mentaati Peraturan Bupati juga terwujudnya hubungan yang baik anggota Satpol PP dan Pedagang Kaki Lima (PKL).	Satpol PP, Diskoperindag	Minggu IV Juni 2017	Memberikan surat tugas dan memantau.
9.	<b>Monitoring dan Evaluasi</b> a. Monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan. b. Evaluasi pelaksanaan kegiatan	Laporan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi.	Satpol PP, Diskoperindag	Minggu IV Juni 2017	Monitor dalam penyusunan laporan.
N o	Tahapan dan Capaian Antara	Output	Stakeholder	Waktu	Peran Project Leader
<b>Jangka Menengah</b>					
1	<b>Sosialisasi Penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima</b>	Tersosialisasinya Penataan dan pembinaan Pedagang	Satpol PP, DPU, DLH, Bag. Hukum, Diskoperindag	Minggu IV Agustus 2017	Narasumber dan penanggungjawab kegiatan

2	<p><b>(PKL) di seluruh Kabupaten Pesisir Barat</b></p> <p>a. Penyiapan Bahan sosialisasi.</p> <p>b. Pelaksanaan sosialisasi.</p> <p>c. Saran dan masukan dari PKL</p> <p>d. Kesimpulan dan tindak lanjut kegiatan.</p> <p><b>Pembinaan kepada para PKL dari Tim Tehnis :</b></p> <p>a. Materi dari tim tehnis</p> <p>b. Tindak lanjut kegiatan.</p> <p>c. Pemantauan di lapangan</p>	<p>Kaki Lima (PKL) di seluruh Kabupaten Pesisir Barat</p> <p>Terbinanya semua PKL di Kabupaten Pesisir Barat</p>	<p>Satpol PP, DLH, Bag. Hukum, Diskoperindag, Dishub</p>	<p>Minggu III Bulan Nopember 2017</p>	<p>Narasumber dan penanggungja wab kegiatan</p>
No	Tahapan dan Capaian Antara	Output	Stakeholder	Waktu	Peran Project Leader
<b>Jangka Panjang</b>					

1	<p><b>Pelaksanaan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pesisir Barat :</b></p> <p>a. Inventarisasi persoalan PKL di Kabupaten Pesisir Barat.</p> <p>b. Penyimpulan persoalan PKL.</p> <p>c. Analisa penyelesaian persoalan PKL.</p> <p>d. Pelaksanaan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pesisir Barat.</p> <p>e. pemberian bantuan gerobak dan tenda</p>	Terlaksananya Penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) di seluruh Kabupaten Pesisir Barat	Satpol PP, Bag. Hukum, Diskoperindag, Dishub, Dinas pariwisata	Bulan April Tahun 2018-2019	Penanggungjawab Kegiatan
---	---	--	--	-----------------------------	--------------------------

Sumber: *Data DISKOPERINDAG Kecamatan Pesisir tengah Tahun 2016* dicatat tanggal 30 juli 2019<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Sumber Dat Diskoperindag kabupaten Pesisir Barat

Pada proses perencanaan di atas terbagi atas 3 proses yaitu jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, pada jangka pendek out put yang diharapkan adalah terbentuknya tim efektif dalam penyusunan peraturan bupati hingga terbentuknya peraturan bupati mengenai pembinaan dan penataan pedagang kaki lima di kabupaten pesisir barat dalam hal ini Perbup yang penulis maksud adalah Perbup No 40 tahun 2016.

Pada proses jangka menengah Out put yang diharapkan tersosialisasinya Perbup tentang penataan dan pembinaan PKL kepada PKL dan masyarakat serta terbinanya semua PKL di Kabupaten Pesisir Barat

Pada proses jangka pendek dari perencanaan out put yang diharapkan adalah terlaksananya Penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) di seluruh Kabupaten Pesisir Barat.

## **2. Pengorganisasian/pelaksanaan**

Pelaksanaan dari perencanaan diatas bahwa pada tanggal 24 oktober tahun 2016 telah disahkan oleh bupati peraturan bupati No 40 tahun 2016<sup>9</sup> mengenai penataan dan Pembinaan Pedagang kaki lima di kawasan Kabupaten Pesisir Barat khususnya di Kecamatan Pesisir Tengah.

Pada tahap pelaksanaan nya Pemerintahan dalam hal ini instansi yang di tunjuk dalam proses pendataan pedagang kaki lima adalah Diskoperindag bekerjasama dengan Satpol PP berdasarkan data yang terkumpul bahwa jumlah

---

<sup>9</sup> lampiranDraf pdf Perbup No 40 tahun 2016



pedagang kaki lima yang berada di kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat berjumlah 84 pedagang.

Menurut Bapak Burhanuddin sebagai pelaksana teknis sosialisasi dan juga pendataan pedagang kaki lima di kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. Pada saat wawancara dengan penulis beliau mengatakan

*“ sejauh ini fokus perhatian kita mengenai pembinaan Pedagang kaki lima di kabupaten Pesisir Barat ada di kecamatan Pesisir Tengah kenapa karena wilayah kecamatan ini merupakan wilayah ekonomi terbesar di kabupaten pesisir barat dan juga persebaran para pedagang kaki lima paling banyak di kecamatan ini begitu juga penambahan jumlah pedagang kaki lima di kecamatan ini akan terus bertambah jika kita tidak melakukan upaya pengawasan di tempat yang telah dilarang oleh peraturan seperti di bahu jalan pinggir sungai trotoar dan juga jembatan.”<sup>10</sup>*

Dibawah ini jumlah pedagang kaki lima di kecamatan pesisir tengah

**Tabel III**  
**Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Pesisir Tengah**

No	Jenis Usaha	Jumlah (Jiwa)
1	Pedagang Buah	12
2	Pegadang Minuman	18
3	Pedagang Sayuran	12
4	Pedagang Kelontongan	5
5	Pedagang Makanan	17
6	Pedagang asesoris	5
7	Pedagang ikan	15
Jumlah		84

<sup>10</sup> Bapak Burhanuddin Wawancara pribadi dicatat tanggal 26 maret 2019

Sumber: *Data DISKOPERINDAG Kecamatan Pesisir tengah Tahun 2018* dicatat tanggal 28 maret 2019

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan ada 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi berikut dibawah ini penulis akan menguraikan bagaimana pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima di kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat

**a. Komunikasi (*communications*)**

Kebijakan penataan pedagang kaki lima di kecamatan pesisir tengah merupakan bagian dari pembangunan kabupaten Pesisir Barat. Berdasarkan wawancara dengan subjek penelitian dalam hal ini adalah bapak Burhanuddin sebagai kasi perdagangan dan juga pelaksana teknis sosialisasi bahwa kebijakan penataan dan pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah adalah dalam rangka mewujudkan kota krui sebagai kota yang bersih, aman, nyaman serta menjamin kelangsungan usaha pedagang kaki lima di kecamatan pesisir tengah.

Menurut wawancara yang dilakukan penulis terhadap bapak Burhanuddin pelaksanaan kegiatan komunikasi peraturan perundang-undangan terkait kebijakan pemerintah daerah kepada pedagang kaki lima yaitu Perbup No 40 tahun 2016. Sosialisasi / Penyuluhan dilakukan pemerintah dinas koperasi usaha kecil dan menengah dan perdagangan melalui Kabid perdagangan bapak Suraji dan Kasi bagian perdagangan bapak Burhanuddin dengan cara menyebarkan surat edaran, pemasangan papan peraturan di pinggir jalan serta mendatangi langsung kepada pedagang kaki lima di lapangan terkait Peraturan Bupati No 40 tahun 2016 sosialisasi ini dilakukan untuk memberi pemahaman kepada pedagang kaki lima

yang berada di pasar tengah kroi serta di wilayah pasar pagi kroi untuk tidak melakukan usaha berjualan di tempat yang di larang oleh pemerintah seperti di bahu jalan sehingga membuat badan jalan semakin sempit dan bersedia di pindahkan ke los penjualan di pasar way batu.

Menurut Bapak Burhanuddin kegiatan sosialisasi dilakukan melalui pendekatan persuasif agar pedagang kaki lima secara sadar dan suka rela mau mentaati kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Apabila pendekatan persuasif tidak bisa dijalankan maka tindakan represif bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) berupa tindakan tegas akan dilakukan tentunya didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait pembinaan pedagang kaki lima pemerintah berdasarkan wawancara penulis kepada bapak Burhanudin bahwa ada beberapa materi pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap kaki lima yaitu:

- 1) Bina Usaha Manusia
  - b. Memberi keterampilan usaha
  - c. Memberi penyuluhan tentang kewirausahaan dan pengenalan kebijakan pemda yang berlaku.
- 2) Bina sarana dan Prasarana
  - b. Menyediakan lokasi penampungan
  - c. Menyediakan sarana dan prasarana
  - d. Memberikan kemudahan proses perizinan.
- 3) Bina permodalan
  - a. Meningkatkan kemampuan manajemen dan administrasi

- b. Meningkatkan kemampuan permodalan dengan fasilitas kredit
  - c. Bina Pemasaran
- 4) Bina Pemasaran
- a. Memberikan pengetahuan tentang manajemen pemasaran
- 5) Bina Organisasi
- a. Mengupayakan terbentuknya organisasi yang mampu mewadahi kegiatan atau usaha (Koperasi)
- 6) Bina Lingkungan
- a. Melaksanakan program berseri
  - b. Membina lingkungan kerja
  - c. Memberikan rasa aman, tenang dalam berusaha.

Dari beberapa macam materi pembinaan yang telah dilakukan Oleh Diskoperindag adalah bina sarana dan prasarana dan bina lingkungan seperti pemberian bantuan tenda dan gerobak serta lokasi lahan untuk sentra kuliner serta kios atau lapak untuk berdagang tan telah disediakan di pasar way batu. Sedangkan materi pembinaan yang lain akan segera di realisasikan ketika anggaran telah keluar seperti yang telah di utarakan bapak Burhanuddin<sup>11</sup>

#### **b. Sumber Daya (*Resources*)**

Dalam pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima di kecamatan pesisir tengah Kabupaten Pesisir Barat tidak terlepas dari sumber daya. Berdasarkan penelitian penulis di lapangan bahwa dapat diketahui yang mempengaruhi kebijakan pembinaan pedagang kaki lima di kecamatan pesisir tengah meliputi:

---

<sup>11</sup> Bapak Burhanuddin wawancara pribadi 28 Mei 2019

sumber daya aparatur pelaksana kebijakan, sumber daya peralatan dan sumber daya anggaran.

Sumber daya aparatur pelaksana dapat dikatakan sebagai salah satu faktor pendukung dalam upaya pembinaan pedagang kaki lima di kecamatan pesisir tengah hal ini dapat diihat dari kesiapan aparatur dinas terkait pembinaan pedagang kaki lima baik secara kuantitas maupun kualitas telah sesuai dalam pembinaan pedagang kaki lima di kecamatan pesisir tengah

Berkaitan dengan ketersediaan aparatur pelaksana pembinaan pedagang kaki lima di kecamatan pesisir tengah Krui yaitu Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan status kepegawaian serta tingkat pendidikan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel

**Tabel VII**

**Komposisi pegawai berdasarkan jumlah status kepegawaian dan tingkat pendidikan**

No	Status kepegawaian	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Pegawai Negri Sipil	Pasca sarjana (S2)	8
		Sarjana	7
		Diploma	1
		SMA	3
2	Pegawai Honorer	S1	3
		Diploma	2
		SMA	5
		Jumlah	29

**Sumber: Data Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan tahun 2019 Di catat tanggal 30 maret 2019**

Berdasarkan data kepegawaian dari tabel diatas dapat diketahui jika di tinjau dari segi kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang terdapat pada instansi pelaksanaan kebijakan peraturan pemerintah dalam hal ini Perbup no 40 tahun 2016 terkait pembinaan pedagang kaki lima di Kecamatan Pesisir Tengah sudah cukup memadai. Sejalan dengan itu hasil wawancara kepada Dinas koperasi perindustrian dan perdagangan kepada bapak Burhanuddin beliau mengatakan,

*“alhamdulillah dek secara pendidikan sebagian besar memang tingkat pendidikan ada yang sudah S2 dan juga S1 atau sarjana ada juga si nining lagi sekolah S1 di STIT(sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah) Multazam disini tapi kita juga gk boleh meragukan kualitas yang lulus menengah atas mereka juga mampu melaksanakan tugas dari dinas jika di perintahkan”<sup>12</sup>*

Jika dilihat dari pernyataan beliau diatas dapat dikatakan bahwa Dinas koperasi perindustrian dan perdagangan kabupaten Pesisir Barat dapat melaksana tugas dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain sumber daya manusia sumber daya yang tak kalah pentingnya dalam pembinaan pedagang kaki lima di kecamatan pesisir tengah kabupaten pesisir barat adalah sumber daya peralatan dan sumber daya anggaran. Hasil penelitian dilapangan menunjukan bahwa sumber daya peralatan yang berhubungan fasilitas yang disediakan pemerintah kecamatan pesisir tengah kabupaten pesisir barat. Berdasarkan wawancara dan observasi wilayah yang di

---

<sup>12</sup>Wawancara pribadi bapak Burhanuddin tanggal 25 Mei 2019

lakukan penulis bahwa ada 3 fasilitas penunjang dalam pembinaan pedagang kaki lima yaitu:

1) Kios Pasar Way batu

Penataan pedagang kaki lima memang menjadi kewajiban pemerintah di setiap daerah tidak terkecuali di kecamatan pesisir tengah kabupaten Pesisir barat . kawasan yang menjadi tempat yang digunakan Pedagang Kaki Lima untuk berjualan adalah tempat yang memang sudah di larang pemerintah yaitu di bahu jalan dan di dekat sungai sesuai perda yang di keluarkan pemerintah daerah Perda no 12 tahun 2017 pasal 16 ayat 1 tentang larangan berjualan di jalan/trotoar jembatan dan bantaran sungai.

Berdasarkan wawancara penulis kepada bapak Burhanuddin terkait fasilitas kios pasar way batu merupakan fasilitas yang digunakan para pedagang yang telah di relokasi dari beberapa tempat yang dilarang berjualan , yaitu pinggir jalan di dekat tugu merdeka yang sering digunakan pedagang ikan laut, di GSG selalau dan lapangan merdeka kroi.

Menurut informasi yang penulis terima dari wawancara terhadap bapak Burhanuddin pembangunan pasar way batu telah menghabiskan dana sebesar Rp 6 Miliar anggaran pada tahun 2018, pada tahun 2018 ukuran los 3x2 meter namun pada tahun 2019 sesuai dengan prototype Kemendag menjadi 3x3 meter, Dengan luas lahan 3 hektare lebih, Pasar Way Batu juga merupakan lokasi terluas dari seluruh pasar yang ada di kabupaten itu , menyusul pasar Biha, sebanyak 45 los dan 198 hamparan saat ini sudah ditempati para pedagang. Di tahun yang sama dengan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 4,945 Miliar

akan dilakukan revitalisasi pasar rakyat di empat lokasi, yaitu pasar Biha Dua di kecamatan Pesisir Selatan, Pasar Kebuayaan Kecamatan Karya Penggawa, Pasar Satuan Pemukiman (SP) 6 dan Pasar Minggu di Kecamatan Ngambur.

Pemerintah berharap para pedagang yang masih berjualan di tempat yang memang di larang pemerintah untuk berdagang agar mau di relokasi ke pasar way batu, menurut bapak Burhanuddin pedagang tidak boleh takut tidak mendapatkan tempat di Pasar Way Batu karena masih banyak kios- kios dan lapak pedagang yang masih kosong, pedagang tinggal pilih di mana tempat yang mereka inginkan terutama untuk pedagang ikan pemerintah telah siapkan los khusus untuk pedagang ikan dan daging.

Menurut Bapak Burhanuddin PKL jangan takut jika di relokasi karena PKL tidak akan dirugikan karena kebijakan pemerintah adapun keuntungan yang di dapat kan oleh PKL adalah:

- 1) Jaminan kelangsungan usaha
- 2) Memiliki tempat usaha yang layak
- 3) Serta mengalami peningkatan status usaha
- 4) Dukungan media promosi (penyebaran informasi lokasi dan produk pada konsumen , baliho.)
- 5) Bantuan dana penjaminan untuk pinjaman pada perbankan.
- 6) Mendapatkan pelatihan manajemen dan kewirausahaan.

Sejauh ini Diskoperindag bekerjasama dengan satpol PP telah berhasil merelokasi sebanyak 25 pedagang kaki lima untuk mengisi los yang berada di pasar way batu berdasarkan wawancara dengan bapak Burhanuddin beliau



mengatakan *"Para pedagang harus memanfaatkan fasilitas yang telah disiapkan pemkab yakni kios pasar rakyat yang berada pasar way batu, penertiban jual beli yang sudah tersedia, serta pasar yang semrawut agar menjadi tertata, Pada dasarnya pedagang keberatan untuk pindah, namun setelah dilakukan mediasi maka para pedagang sepakat untuk pindah ke los yang baru. Sebelumnya, pedagang mengajukan permohonan pertanggal 1 Maret 2019 mereka akan pindah dengan sendirinya. Namun tidak dilakukan, sehingga dilakukanlah penertiban sesuai peraturan yang berlaku."*<sup>13</sup>

Namun penulis melakukan wawancara kepada bapak hasan salah satu pedagang ikan yang sering kedapatan berjualan di pinggir jalan dekat tugu merdeka beliau mengatakan

*" lain mak haga ngisi kios di way batu no, ana ti liak ram disan no mangi, kadu aga bayar siwo ni muneh pandai mawat niku Rp 3.000.000 sebulan , duit telu juta no adu cukup nihan pakai bayar keperluan anak sekula , makkung pakai beli solarni jukung dipa da ni neram bangik kik ngena iwa lamun , naya reno da yung (bukan gak mau ngisi kios di way batu itu, kita liat disana sepi terus bayar sewa lagi tau gk kamu Rp 3.000.000 sebulan, uang tiga juta itu sudah cukup buat bayar uang sekolah anak, belum buat beli solar perahu , terus punya kita mana..! enak kalo dapat ikan banyak, naa gitu dek)"*<sup>14</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui salah satu alasan para pedagang enggan mengisi kios di pasar way batu adalah uang sewanya walaupun sewa kios menurut sebagian orang tidak terlalu mahal untuk tempat usaha , namun

<sup>13</sup> Bapak Burhanuddin wawancara pribadi 25 mei 2019

<sup>14</sup>Wawancara pribadi bapak hasan tanggal 28 Mei 2019

yang menjadi alasan lainnya adalah sepi pembeli . berdasarkan observasi penulis ke tempat kios way batu memang sebagian tempat masih kosong karena belum banyak yang mengisi los-los di dalam kios pasar way batu dan itu wajar karena pembangunan kios-kios di pasar way batu ini baru selesai di bangun.

a. Bantuan berupa gerobak dan tenda

Menurut wawancara dengan Bapak Burhanuddin bahwa pihaknya telah memberikan bantuan kepada pedagang kaki lima berupa 50 gerobak dan 50 tenda yang tersebar di pasar yang ada di Kabupaten Pesisir Barat rinciannya adalah 20 tenda 20 gerobak di berikan di pasar minggu yang ada di kecamatan ngambur sedangkan sisanya di berikan kepada pedagang yang berjualan di pasar yang ada di kecamatan pesisir tengah, bantuan gerobak dan tenda ini berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) mekanisme pemberian bantuan ini menurut beliau adalah mereka yang menerima bantuan merupakan pedagang yang telah terdaftar oleh Diskoperindag yang syarat Pedagang Kaki Lima yang mendapat bantuan tersebut adalah :

- 1) Mempunyai KTP Pesisir Barat/ surat Domisili
- 2) Jelas usahanya/ barang dagangannya
- 3) Surat keterangan dari peratin (kepala desa) atau lurah setempat.

Menurut beliau bahwa bantuan yang diberikan kepada para PKL tersebut diharapkan dapat mengurangi beban biaya produksi sehingga keuntungan para PKL bisa meningkat.

**TABEL V**  
**Kecamatan Ngambur Tahun 2018**

No	Nama	Jenis		Alamat
		Gerobak	Tenda	
1	Junaidi	✓	✓	Pasar Minggu
2	Usman	✓	✓	Pasar Minggu
3	Wardono	✓	✓	Pasar Minggu
4	Asep	✓	✓	Pasar Minggu
5	Sumaryo	✓	✓	Pasar Minggu
6	Adi	✓	✓	Pasar Minggu
7	Titin	✓	✓	Pasar Minggu
8	Maryani	✓	✓	Pasar Minggu
9	Hendra	✓	✓	Pasar Minggu
10	Arwati	✓	✓	Pasar Minggu
11	Lukman	✓	✓	Pasar Minggu
12	Mugiono	✓	✓	Pasar Minggu
13	Lia sari	✓	✓	Pasar Minggu
14	Mardiyah	✓	✓	Pasar Minggu
15	Nanang	✓	✓	Pasar Minggu
16	Saiful	✓	✓	Pasar Minggu
17	Saswito	✓	✓	Pasar Minggu
18	Muslimin	✓	✓	Pasar Minggu
19	Sutejo	✓	✓	Pasar Minggu
20	Nur Kamal	✓	✓	Pasar Minggu

Sumber : Data Diskoperindag 2018 dicatat tanggal 30 Mei 2019

Sebanyak 20 gerobak dan 20 tenda bantuan dari Dinas koperasi perindustrian dan perdagangan yang di berikan pemerintah ke kecamatan Ngambur tidak bisa di observasi penulis dikarena bukan wilayah penelitian penulis dan juga jarak antara kecamatan pesisir tengah dan kecamatan Ngambur yang cukup jauh yaitu 54,8 km akan memakan waktu sekitar 1 jam 25 menit

lewat jalan lintas Sumatera

**TABEL VI**  
**Kecamatan Pesisir Tengah Tahun 2018**

No	Nama	Jenis		Alamat
		Gerobak	Tenda	
1	Sumarlin	✓	✓	Serai
2	Rizal Anwar	✓	✓	Kampung Jawa
3	Maspono	✓	✓	Kampung Jawa
4	Hasan Nazili	✓	✓	Walur
5	Rohaida	✓	✓	Kampung Jawa
6	Suwardi	✓	✓	Rawas
7	Megawati	✓	✓	Rawas
8	Suparjo	✓	✓	Rawas
9	Mulyadi	✓	✓	Rawas
10	Alkok	✓	✓	Pasar Krui
11	Nurmasyah	✓	✓	Labuhan Jukung
12	Irawan	✓	✓	Pasar Mulia
13	Samsul	✓	✓	Pasar Mulia
14	Zil Hakim	✓	✓	Way Batu
15	Kusuma	✓	✓	Kampung Sawah
16	Susilo	✓	✓	Kampung Jawa
17	Nurbaiti	✓	✓	Serai
18	Hasanah	✓	✓	Serai
19	Khotman	✓	✓	Rawas
20	Yuzanni	✓	✓	Labuhan Jukung
21	Johan	✓	✓	Tanah Lapang
22	Hendra	✓	✓	Rawas
23	Haidir	✓	✓	Pasar Mulia
24	Alimuddin	✓	✓	Pasar Krui
25	Mat Rupawan	✓	✓	Pasar Krui
26	Herman Pasya	✓	✓	Walur
27	Sadarudin	✓	✓	Pasar Mulia

28	Salam	✓	✓	Rawas
29	Yudi effendi	✓	✓	Way Batu
30	Heru Pranoto	✓	✓	Pasar Krui

Sumber: *DataDISKOPERINDAG 2018* Dicatat tanggal 30 Mei 2019

Berdasarkan data tabel diatas yang telah penulis kumpulkan sebanyak 50 gerobak etalase kaca berukuran 2x1 meter dan tenda yang dibagikan ke pedagang kaki lima di dua kecamatan yaitu di kecamatan pesisir tengah sebanyak 30 gerobak dan 30 tenda dan di kecamatan ngambur sebanyak 20 gerobak dan 20 tenda. Data tabel diatas penulis catat pada tanggal 30 Mei 2019 sedangkan bantuan telah di salurkan pada pertengahan tahun 2018 oleh Dinas koperasi perindustrian dan perdagangan. Observasi penulis di lapangan terlihat bahwa memang gerobak bantuan pemerintah masih bagus atau masih layak digunakan namun tenda sebagian besar telah rusak tidak bisa di pakai lagi di karenakan faktor alam seperti terkena tiupan angin kencang sehingga besi penyangga patah dan kain tendanya sobek.

#### c. Sentra Kuliner

Pemerintah daerah melalui Diskoperindag telah membuat sentra khusus kuliner Kaki lima yang berlokasi di jln kesuma kecamatan pesisir tengah pasar kota krui berukuran 20 x 30 meter.

**TABEL VII**  
**Pedagang di Sentra Kuliner Kecamatan Pesisir Tengah**

No	Jenis Dagangan	Jumlah
1	Nasi Goreng	2
2	Pedagang bakso	3

3	Minuman Hangat dan dingin	3
Jumlah		8

Sumber: *Data Diskoperindag tahun 2019* dicatat tanggal 30 Mei 2019

Sentra kuliner ini di buka hanya pada pukul 18 : 00 WIB sampai pukul 01 : 00 WIB karena pada siang hari lokasi ini di gunakan untuk lahan parkir , para pedagang yang mengisi lokasi ini adalah pedagang yang mempunyai KTP Pesisir Barat para pedagang diberikan izin untuk berjualan tanpa harus membayar retribusi namun harus tetap menjaga kebersihan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Suparjo dan salah satu pedagang nasi goreng beliau mengatakan bahwa beliau mendapatkan penghasilan yang cukup lumayan dari sebelumnya berkeliling menggunakan gerobak dan merasa aman dan nyaman tidak perlu takut keujanan atau pulang larut malam.

*“Ya Alhamdulillah dek dalam semalam bisa habis 30 an piring sampai 40 an pring dek ya dari pada kita keliling terus di tegur di suruh pindah dan lain-lain enak disini aman kita tinggal bawa bahan dorong gerobaknya deket dari rumah kesini”*<sup>15</sup>

Sedangkan wawancara dengan bapak rizal salah satu pedagang minuman hangat dan dingin mengatakan kurang lebih sama dengan bapak suparjo mengenai penghasilan yang didapat di lokasi ini.

*Alhamdulillah selama berdagang disini untuk pendapatan lumayanlah untuk bayar anak sekolah dan juga buat kebutuhan sehari-hari setiap mlm minggu pasti rame anak-anak muda nongkrong disini*<sup>16</sup>

Berdasarkan observasi dan wawancara penulis di sentra kuliner ini rata-rata pedagang yang di tempatkan di sentra ini mendapat pengasilan yang cukup

<sup>15</sup> Bapak Suparjo wawancara pribadi dicatat tanggal 27 Mei 2019

<sup>16</sup>Bapak Rizal wawancara pribadi dicatat tanggal 27 Mei 2019

baik dibandingkan dari pada sebelumnya mereka berkeliling .

**c. Disposisi (*Dispositions*)**

Berhasil atau tidaknya implementasi suatu kebijakan dalam pembinaan pedagang kaki lima di kecamatan pesisir tengah salah satu faktornya adalah sikap aparatur pelaksana (implementor). Sikap ini berkaitan dengan komitmen, kemauan dan keinginan dari implementor demi terwujudnya suatu kebijakan publik tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Burhanuddin bahwasanya Dinas koperasi perindustrian dan perdagangan serius dalam melaksanakan program-program terkait pembinaan dan penataan pedagang kaki lima di kecamatan pesisir tengah menurut beliau ada 2 alasan yang menjadi dasar komitmen pemerintah dalam melaksanakan pembinaan dan penataan pedagang kaki lima di kecamatan pesisir tengah alasan yang pertama adalah kecamatan pesisir tengah merupakan bagian dari Ibukota kabupaten Pesisir barat serta menjadi bagian kawasan wisata turis luar negri dan lokal yaitu di pantai labuhan jukung sudah seharusnya kecamatan pesisir tengah menjadi contoh dan tolak ukur bagi pengembangan wilayah di kecamatan-kecamatan lainnya di kabupaten Pesisir Barat. Alasan kedua yaitu mewujudkan visi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan yaitu terwujudnya Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) Perindustrian dan perdagangan yang professional, beriman dan bertakwa serta berwawasan lingkungan dan berkesinambungan.

Hasil observasi penulis terkait sikap implementor atau pelaksana kebijakan komitmen dan keseriusan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dalam pembinaan pedagang kaki lima di Kecamatan Pesisir Tengah telah dilaksanakan berbagai upaya berdasarkan Peraturan Bupati No 40 tahun 2016 bahwasanya terlihat koordinasi yang baik terhadap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kabupaten Pesisir Barat dalam penertiban dan juga koordinasi yang baik juga dengan Dinas Pariwisata dalam proses Perijinan untuk berjualan di dalam los area wisata di labuhan jukung pedagang kaki lima di kecamatan Pesisir tengah Krui.

Dengan koordinasi yang baik antar instansi yang terlibat dalam suatu kebijakan akan membuat kebijakan berjalan secara maksimal dan mencapai tujuan yang diinginkan. Memberikan kemudahan dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan membuat kebijakan dapat diterima oleh masyarakat, sehingga tercipta koordinasi yang baik tidak hanya dengan instansi yang terlibat tetapi dengan masyarakat sebagai sasaran kebijakan sehingga dapat dikatakan kebijakan tersebut berhasil.

#### **d. Struktur Birokrasi ( *Bureaucratic Structure* )**

Struktur birokrasi atau struktur organisasi merupakan salah satu faktor yang penting dalam implementasi suatu kebijakan. Struktur organisasi merupakan gambaran dari pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi suatu kebijakan. Dalam Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pesisir Tengah terdapat banyak pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di kecamatan Pesisir Tengah tersebut. Hal ini dapat dilihat bahwa Kebijakan



Pembinaan dan penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pesisir Tengah menyangkut dalam beberapa aspek penting dalam kehidupan yaitu aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi dan masing-masing aspek diatur oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam bidangnya.

Berdasarkan wawancara kepada bapak Burhanuddin terkait birokrasi dalam struktur birokrasi, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan bidang menjalankan tugas dengan baik berdasarkan tugas dan fungsi pada bidang masing-masing. Semua mampu bekerja sama sesuai dengan porsinya masing-masing.

Perumusan kebijakan merupakan salah satu tugas birokrasi dan merupakan salah satu hal terpenting dalam birokrasi. Dalam perumusan kebijakan berkaitan dengan pembinaan dan penataan pedagang kaki lima di Kecamatan Pesisir Tengah tentunya dilakukan dengan berbagai strategi kebijakan. Menurut beliau strategi yang digunakan di dalam pembinaan dan penatan pedagang kaki lima adalah pertama melakukan koordinasi lintas instansi terkait pembinaan dan penataan pedagang kaki lima di kecamatan pesisir tengah yaitu koordinasi dengan Satpol PP , Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Camat kecamatan Pesisir Tengah. Strategi yang kedua adalah pendekatan ekonomi dan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang berhubungan pengembangan usaha dan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan daerah dengan cara sosialisasi demi meningkat partisipasi pedagang kaki lima dalam proses pembinaan.

Berdasarkan temuan penulis di lapangan bahwa koordinasi instansi terkait pembinaan pedagang kaki lima di kecamatan Pesisir tengah baik Satpol PP dan

Dinas Pariwisata telah melakukan sesuai dengan kapasitasnya sebagai pembantu kebijakan pembinaan pedagang kaki lima yaitu dengan melakukan penertiban pedagang kaki lima jika melanggar serta memberi ijin dagang sebagian tempat wisata seperti didepan gerbang masuk wisata Labuhan Jukung.

Namun dalam pengamatan yang peneliti lakukan tingkat partisipasi pedagang kaki lima dalam pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima di kecamatan pesisir tengah hanya sebatas partisipasi dalam tuntutan, sedangkan partisipasi dalam bentuk dukungan kebijakan pembinaan pedagang kaki lima dikecamatan pesisir tengah belum begitu kelihatan ini terlihat dari wawancara penulis kepada bapak Suwardi penjual minuman es kelapa muda di dekat pantai labuhan jukung beliau mengatakan

*“Sebenarnya mas lebih laris jualan di dalam itu mas , cuma gk boleh kita hanya boleh jualan di luar aja , lagian jualan didalam juga harus deket dengan orang dinas supaya dapat ijin jualan disana, ya alhamdulillah mas dapat ijin di luar juga syukur dari pada gk kita cuma bayar uang kebersihan aja gak perlu bayar pajak<sup>17</sup>”.*

### **3. Monitoring / Pengawasan**

Monitoring atau pun pengawasan merupakan kegiatan memantau apakah program telah berjalan dengan baik atau atau tidak, pada pelaksanaan monitoring ini Diskoperindag selaku lembaga yang di bertanggung jawab terhadap

---

<sup>17</sup>Bapak Suwardi wawancara pribadi tanggal 29 Mei 2019

keberadaan pedagang kaki lima di kecamatan pesisir tengah bekerja sama dengan satpol PP terkait fungsi pengawasan .

Pengawasan yang dilakukan pemerintah terkait pembinaan pedagang kaki lima di kecamatan pesisir tengah bahwa hasil wawancara penulis kepada bapak Burhanuddin terkait pengawasan pedagang kaki lima di kecamatan ini beliau mengatakan

*” pengawasan pedagang kaki lima di krui ini sebenarnya lembaga yang di tunjuk bupati dalam hal ini ialah satpol PP, dari laporan kami bahwa satpol pp melakukan pengawasan 1 kali dalam sebulan kemudian membuat laporan tertulis yang akan kami terima sebagai bahan evaluasi kami terkait pedagang yang masih melanggar peraturan yang berlaku seperti larangan berjualan di pinggrir jalan bantaran sungai dan lain sebagainya tentu jika ada yang melanggar akan kita tertibkan berkoordinasi dengan satpol PP seperti itu ”<sup>18</sup>*

Wawancara di atas menunjukkan pengawasan yang dilakukan oleh Diskoperindag bersama satpol PP dalam mengawasi bagaimana jalannya perencanaan yang telah disusun sebelumnya diatas .

---

<sup>18</sup> Bapak Burhanudin wawancara pribadi dicatat tanggal 25 mei 2019

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM  
PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN PESISIR  
TENGAH KABUPATEN PESISIR BARAT**

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang bagaimana upaya pemerintah daerah dalam pembinaan pedagang kaki lima di kecamatan pesisir tengah kabupaten pesisir barat serta bagaimana dampak yang di terima pedagang kaki lima di kecamatan pesisir tengah. Pembahasan ini untuk memperoleh beberapa penjelasan melalui analisa terhadap upaya dari pemerintah dalam kelangsungan usaha para pedagang kaki lima di kecamatan pesisir tengah

**A. Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Pesisir Tengah Dan Permasalahannya.**

Bermula dari pedagang keliling yang memasarkan dagangannya keberbagai tempat yang ramai, di sanalah awal sebutan “Pedagang Kaki Lima” atau PKL. Biasanya, para pedagang yang pindah-pindah itu, membawa kain besar segi empat ke mana ia pergi. Setelah menemukan tempat yang dianggap layak untuk menjual barang dagangannya, kain besar itu dikembangkan. Keempat sudut diikat dan dihubungkan dengan tongkat sebagai tiang dan dibagian tengahnya ditopang dengan galah bambu. Jadilah empat sudut dan satu tiang penyangga menjadi lima. Sehingga, pedagang dan pembeli berlindung dibawah tenda berkaki lima. Lama-lama, popularlah sebutan kepada pedagang tidak tetap yang berada di tanah lapang atau pinggir jalan itu sebagai pedagang kaki lima.

Di kecamatan pesisir tengah sebelum adanya pemekaran daerah oleh pemerintah pusat yang kala itu masih menjadi bagian dari kabupaten Lampung Barat para pedagang kaki lima khususnya di pantai labuhan dan disekitaran tugu merdeka pasar krui bebas menjajakan dagangannya tanpa takut di gusur atau di relokasi karena pada saat itu belum ada peraturan yang tegas terhadap pedagang kaki lima namun mereka hanya membayar uang sewa kepada preman.

Kehadiran para PKL ini, pada umumnya dilakukan oleh pedagang-pedagang yang bermodal kecil. Mereka berjualan bukan untuk mencari kaya, tetapi sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari guna mengganjal perut. Sekedar untuk menghidupi keluarganya agar terbebas dari kemiskinan. Hanya itu. Sebab, mereka tidak punya modal besar untuk membeli stand dan kios di pasar atau membeli toko yang permanen.

Keberadaan PKL di Kota Krui kecamatan Pesisir tengah biasanya pada hari-hari pasar. Namun dikota-kota pada umumnya rutin setiap hari. Ada PKL permanen dan ada pula yang tidak. PKL permanen menempati lahan tetap di tanah lapang, tanah kosong atau pinggir jalan yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Sehingga yang tidak permanen, hanya pada waktu-waktu tertentu. Tidak jarang, bahkan menutup jalan raya sama sekali di sore hingga malam hari, biasa pedagang yang adalah yang berjualan ikan laut yang ketika selesai menangkap ikan mereka langsung menggelar tikar dan meja di pinggir jalan di dekat tugu merdeka yang membuat jalan semakin sempit dikarenakan aktivitas antara penjual dan pembeli itu.

Kalau di desa-desa atau kota kecil peranan PKL tidak pernah menjadi masalah. Namun di daerah Krui kecamatan Pesisir Tengah yang kini menjadi daerah otonomi baru khususnya menjadi problema. Tidak saja PKL itu dianggap sebagai pengganggu kelancaran lalu lintas kalau PKL itu berada di pinggir jalan raya, . Artinya, PKL itu membuat keresahan apabila mereka dengan seenaknya menempati halaman dan trotoar di depan rumah atau toko. Kebiasaan “jelek” yang sering terjadi di Krui dan sekitarnya.

Namun setelah terjadinya pemekaran wilayah daerah menjadi Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan hasil dari pemekaran dari kabupaten pesisir barat yang disahkan oleh undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 Pesisir Barat Provinsi Lampung pada tanggal 25 Oktober 2012 kemudian diresmikan pada tanggal 22 April 2013. Peraturan-Peraturan dan Program pun di berlakukan untuk kemajuan daerah dan untuk kesejahteraan masyarakatnya tidak terkecuali kepada para pedagang kaki lima di kecamatan pesisir tengah.

## **B. Analisa Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima**

Setelah penulis menyampaikan teori pada bab II dan data-data lapangan pada bab III dalam pembinaan pedagang kaki lima dalam hal ini pelaksana pembinaan berdasarkan peraturan pada bab I peraturan bupati no 40 tahun 2016 Diskoperindag yang di tunjuk sebagai pelaksana pembinaan .

Salah satu esensi kehadiran kebijakan publik (*public policy*) adalah memecahkan masalah yang berkembang di masyarakat secara benar pada teori George C Edward di bab II tentang pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima

ada empat instrumen yang mempengaruhi berjalan atau berhasilnya suatu kebijakan publik yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. dalam hal ini pembinaan pedagang kaki lima di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat .

Di bawah ini penulis akan berusaha menganalisa kebijakan pemerintah daerah Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dalam melaksanakan Perbup No 40 Tahun 2016 dalam upaya pembinaan pedagang kaki lima dengan menggunakan Teori Kebijakan Publik dari George C Edward.

Hasil analisa penulis mengenai upaya pembinaan pedagang kaki lima oleh pemerintah daerah atas Perbup No 40 Tahun 2016 Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan teori Kebijakan Publik pada bab II dan temuan lapangan pada bab III diketahui bahwa demi mencapai suatu tujuan dari kebijakan suatu pemerintah dalam pembinaan pedagang kaki lima harus terpenuhinya empat unsur ini dengan baik yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan yang dalam hal ini menjadi aktor pelaksana kebijakan pemerintah Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.

1. Komunikasi (*communications*)

Salah satu faktor keberhasilan dari sebuah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah adanya komunikasi yang baik antara aktor pelaksana kebijakan dan juga objek penerima kebijakan kaitannya dengan pembinaan pedagang kaki lima di Kecamatan Pesisir Tengah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pesisir Barat telah

melakukan komunikasi dengan 2 cara yaitu persuasif yaitu dengan cara menyebarkan surat edaran, pemasangan papan peraturan di pinggir jalan serta mendatangi langsung kepada pedagang kaki lima di lapangan terkait Peraturan Bupati No 40 tahun 2016. Komunikasi Persuasif dilakukan oleh Diskoperindag agar pedagang kaki lima memahami dan suka rela menaati peraturan yang berlaku. Cara yang kedua adalah Represif tindakan ini di ambil jika upaya persuasif tidak di ikuti maka Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan berkerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja akan menertibkan para pedagang kaki lima yang nekat berjualan di tempat yang dilarang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku

Hasil penelitian diatas jika dihubungkan dengan Teori Edward maka komunikasi merupakan faktor yang bersifat pendukung dalam sebuah pelaksanaan suatu kebijakan dalam hal ini pembinaan Pedagang Kaki Lima.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan elemen yang sangat penting dalam proses pelaksanaan pembinaan sumber daya mencakup tiga hal yaitu sumber daya aparatur pelaksana, sumber daya fasilitas dan sumber daya anggaran.

Hasil penelitian penulis mengenai sumber daya bahaya pemerintah daerah Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten pesisir Barat

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan sebagai pelaksana pembinaan pedagang kaki lima berdasarkan sumber daya aparat dikatakan



bapak Burhanuddin bahwa pihaknya memahami betul terkait tugas dan fungsinya masing-masing. Kemudian sumber daya fasilitas sumber daya ini meliputi kios way batu, bantuan gerobak dan tenda, sentra kuliner.

Fasilitas tersebut digunakan oleh pedagang kaki lima untuk mengembang usahanya, temuan penulis bahwa kios way batu sebagian pedagang enggan menempati kios karena biaya sewanya relatif mahal dan juga sepi sedangkan bantuan gerobak tenda sebagian gerobak masih digunakan oleh para pedagang namun tendanya sudah banyak yang rusak karena angin kencang, sentra kuliner inilah yang menurut penulis sangat membantu para pedagang kaki lima karena tiap malam pengunjungnya cukup ramai sehingga para pedagang mendapat penghasilan yang cukup lumayan.

### 3. Disposisi

Tanpa respon yang baik dari suatu lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah mengenai kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. maka suatu kebijakan takkan terlaksana dengan baik

Dinas pelaksana pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pesisir Tengah yaitu Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan. Dalam hal ini respon para pelaksana yaitu mendukung kebijakan Perbup no 40 No 2016 dengan melaksanakan sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing.

### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi atau struktur organisasi merupakan salah satu faktor yang penting dalam implementasi suatu kebijakan. Struktur organisasi merupakan gambaran dari pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi suatu kebijakan. Pada pelaksanaannya pemerintah daerah Kecamatan Pesisir Tengah dalam hal ini Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan sebagai aktor pelaksana telah melakukan kerjasama terkait pembinaan dan penataan pedagang kaki lima di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat

Beberapa instansi pemerintah dilibatkan dalam pelaksanaan pembinaan Pedagang Kaki Lima seperti dinas Pariwisata memberi Izin kepada sebagian Pedagang kaki Lima untuk Berjualan di dalam Lingkungan wisata Labuhan Jukung dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai eksekutor penertiban jika di dapati ada pedagang kaki lima yang melanggar aturan terkait Perbup No 40 Tahun 2016

Hanya saja berdasarkan temuan penulis dilapangan bahwa dalam pengamatan yang peneliti lakukan tingkat partisipasi pedagang kaki lima dalam pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima di kecamatan pesisir tengah hanya sebatas partisipasi dalam tuntutan, sedangkan partisipasi dalam bentuk dukungan kebijakan pembinaan pedagang kaki lima dikecamatan pesisir tengah belum begitu kelihatan ini terlihat dari wawancara penulis kepada beberapa pedagang kaki lima di kecamatan Pesisir Tengah ini karena kan dalam perumusan kebijakan para pedagang kaki lima tidak di libatkan sehingga para pedagang kaki lima keberatan

terkait kebijakan yang berlakukan seperti wawancara penulis kepada bapak Hasan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa upaya pemerintahan dalam membina pedagang kaki lima di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana telah diuraikan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Dalam proses pembinaan Pedagang Kaki lima di kecamatan Pesisir Tengah Dinas Koperasi Perindustriandan Perdagangan telah melakukan komunikasi secara persuasif demi memberi pemahaman kepada para Pedagang Kaki Lima dalam menaati peraturan yang berlaku dan upaya refresif kepada para pedagang yang tidak menaati peraturan.

Pembangunan pasar di way batu untuk menampung para pedagang kaki lima agar tidak berjualan di ruang publik, bantuan gerobak sebanyak 30 gerobak dan 30 tenda namun tenda yang sebagian besar telah rusak, sentra kuliner juga telah dibuat agar pedagang di beri ruang yang legal untuk berjualan.

Belum berjalan nya semua program yang di rencanakan pemerintah seperti bina permodalan dan juga bina organisasi dimana kedua program ini sangat dibutuhkan dalam pengembangan usaha mereka.

#### **1. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat dikemukakan beberapa saran yang kiranya dapat berguna bagi semua pihak.

1. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat segera menyusun model pembinaan yang terprogram dan berkelanjutan, agar dapat mewujudkan usaha PKL yang mandiri dan berdaya guna bagi pelakudan Pemerintah daerah
2. Pemerintah daerah harus membuka diri untuk bekerjasama dengan elemen masyarakat dalam penanganan masalah Pedagang Kaki Limaini. seperti LBH dan beberapa LSM atau pihak akdemis mungkin bisa dilibatkan untuk melakukan riset pemetaan persoalan Pedagang Kaki Lima.

## 2. Penutup

Alhamdulillahirobbil'alamin segala pujidan syukur keatashadirat Allah Subhanawataalayang telah memberikan rahmat serta hidayah nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi atau Karya Ilmiah inidenganlancar, dan juga tidaklupa pula penuliss ampaikan shalawat serta salam kepada Nabi dan Rosul penutup Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa dinanti- nantikan syafaatnyaYaumil Qiyamah Kelak.

Atas segala kritik dan saran dari semua pembaca yang budiman, penulis menghaturkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya semoga Allah SWT memberikanbalasan yang setimpal denganamalibadahnya. Akhirulkalam penulis mengucapkan terimakasih kepada semuapihak yang telah membantu serta memberi kanmotivasi kepadapenulis, semogasemua yang diberikan penulis menjadi amal shaleh amal kebaikan disisi Allah SWT, dansemoga karya ilmiah atau skripsi iini dapatberguna serta bermanfaat bagi penulis pada khususnya jugapara pembaca pada umumnya. Aamiin...

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, Teori dan praktik ekonomi Islam Jakarta : Rineka. 1995
- Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, Yogyakarta, Teras 2009
- Ahsanuddin Mudi, *Profesional Sosiologi*, Jakarta: Mendiutama, 2004
- Buchari Alma, *Kewirausahaan*, Alfabeta, Bandung, 2005
- Buchari Alma, *kewirausahaan*, Alfabeta, Bandung, 2005
- Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori & Proses Yogyakarta: Media Presindo, 2007
- Departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar bahasa Indonesia, Balai pustaka, Jakarta 1990
- Dr. Sartika Tiktik Partomo M.S, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah & Koperasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Dr. Solichin Abdul Wahab, Analisis kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Ensiklopedia Indonesia vol 2, Jakarta, hal 890
- Ensiklopedia Indonesia vol 1, Jakarta, hal 890
- Etta Mamang Sengadji, *Metode Penelitian* Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010
- Frans Wiryanto Jomo, *Membangunan Masyarakat*. Bandung: Alumni. 1986
- Gunawan Sumodiningrat, memberdayakan masyarakat, (Jakarta: Penakencana Nusadwipa, 1996) cet. Ke-1
- Hesel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan Publik yang Membumi*, 2003
- Hesel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus* Yogyakarta: Lukman Offset dan YPASI, 2003
- Inu Kencana Syafie, *Sistem Administrasi Negera Republik Indonesia*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003
- Jalaludin Rakhmat, metodologi penelitian komunikasi, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996
- Kartini kartono, pengantar metodologi riset sosial, mandar maju, Bandung, Cetakan ke VIII, 1996
- Koentjaraningrat, *metode-metode penelitian masyarakat*, Gramedia pustaka, Jakarta, 1998
- Lampiran Perbup No 40 tahun 2016

- mam Gunawan, *Metodelogi Penelitian kualitatif Teori &Praktik* , Jakarta: Bumi Aksara,2013
- Masdar Helmi *Dakwah Alam dalam Pembangunan I*.Semarang Toha Putra, 1971
- Mesiono, *Manajemen dan Organisasi*, Bandung: Citapustaka, 2012
- Michel Qunn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar,2006
- Nanang fatah,*Landasan manajemen pendidikan* (Bandung , Rosdakarya,2009),h
- Nanang fatah,*Landasan manajemen pendidikan* Bandung , Rosdakarya 2009
- Permadi Gilang, S.S, *Pedagang Kaki Lima Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, Jakarta: Yudhistira, 2007
- Ramli Rusli “*Sektor informal perkotaan pedagang kaki lima*” ,Jakarta:Ind-Hill.co, 1992
- Riant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2003
- Siswanto, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011
- Subarsono, AG, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung:2014
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Wahdi Bachtiar, *metode ilmu dakwah* ,Logos, Jakarta 1997
- Wayne Parsons, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan* Jakarta:Kencana, 2006